



**PERUBAHAN
RKPD 2022**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Kabupaten Morowali
Tahun 2022**



BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR...*25*...TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaanya dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga penganggaran yang menjadi landasan perencanaan penyusunan kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mrowali Tahun 2022;
- c. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan Kerangka Pendanaan Tahun

Anggaran sebelumnya, maka Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 perlu di ubah;

- d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Morowali) Nomor 020) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal

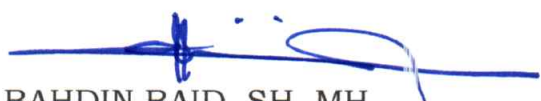
Pj.SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.Morowali



BAHDIN BAID, SH.,MH
Pembina Tkt. I,IV / b
Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MOROWALI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	II-61
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-109
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-4
4.3 Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-55
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020
	II-1
Tabel 2.2.	Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2021
	II-16
Tabel 2.3	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2021
	II-17
Tabel 2.4	Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama.....
	II-18
Tabel 2.5	Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Buah
	II-19
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk, kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2010-2020
	II-22
Tabel 2.7	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021
	II-25
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Morowali Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016—2020
	II-26
Tabel 2.9	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali 2015 – 2019.....
	II-28
Tabel 2.10	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali 2015 – 2019
	II-29
Tabel 2.11	Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2019
	II-30
Tabel 2.12	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2012-2021
	II-31
Tabel 2.13	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021.....
	II-33
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah, Menurut Kabupaten/Kota, 2016 – 2021.....
	II-35
Tabel 2.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2017 – 2021
	II-36
Tabel 2.16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), 2017 – 2021)
	II-37
Tabel 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021
	II-38
Tabel 2.18	APM dan APK Menurut Kabupaten Morowali, 2019 – 2021.....
	II-39
Tabel 2.19	Angka Putus Sekolah (APS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
	II-40

Tabel 2.20	Angka Kelulusan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-41
Tabel 2.21	Angka Melanjutkan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-41
Tabel 2.22	Presentase Balita Stunting Kabupaten Morowali Pada Tahun (2019 -2021)	II-42
Tabel 2.23	Angka Kematian Ibu Bayi Kabupaten Morowali, Pada Tahun (2019 – 2021)	II-42
Tabel 2.24	Data Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk	II-43
Tabel 2.25	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	II-43
Tabel 2.26	Rasio Dokter Per satuan Penduduk	II-44
Tabel 2.27	ZData Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk	II-45
Tabel 2.28	Data Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	II-46
Tabel 2.29	Cakupan Indikator Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani.....	46
Tabel 2.30	Data Capaian Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Pada Tahun (2019 – 2021)	II-47
Tabel 2.31	Data Capaian Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Pada Tahun (2019 – 2020)	II-47
Tabel 2.32	Data Capaian Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pada Tahun (2019 – 2021).....	II-48
Tabel 2.33	Data Capaian Rasio Jaringan Irigasi, Pada Tahun (2018 – 2021).	II-49
Tabel 2.34	Data Rumah Layak Huni (Unit), Pada Tahun (2019 – 2021)	II-49
Tabel 2.35	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Pada tahun (2019 – 2021)	II-50
Tabel 2.36	Persentase Penduduk Miskin Pada Tahun (2019 – 2021)	II-50
Tabel 2.37	Jumlah Angkatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun (2018 – 2021)	II-51
Tabel 2.38	Aspek Ketersediaan Pangan	II-52
Tabel 2.39	Data Keluarga Miskin	II-52
Tabel 2.40	Data Status Gizi Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali	II-53
Tabel 2.41	Data Situasi Pangan Dan Gizi	II-53
Tabel 2.42	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	II-54
Tabel 2.43	Capaian Indikator Bidang Kinerja Bidang Perhubungan	II-54
Tabel 2.44	Data Tower Kabupaten Morowali	II-55
Tabel 2.45	Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali	II-56
Tabel 2.46	Data Jumlah Koperasi Aktif (2019 – 2021)	II-56
Tabel 2.47	Produksi Kebutuhan Protein Hewani Kabupaten Morowali, Tahun (2019 – 2021)	II-57
Tabel 2.48	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Objek Wisata	II-57
Tabel 2.49	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (TON)	II-59

	Kabupaten Morowali Tahun (2018 – 2021)	
Tabel 2.50	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-60
Tabel 2.51	Indikator Capaian Kinerja Bidang Perindustrian	II-60
Tabel 2.52	Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-61
Tabel 2.53	Persentase Pendapatan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-62
Tabel 2.54	Persentase Belanja APBD Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-62
Tabel 2.55	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Morowali s/d Triwulan II Tahun 2022	II-63
Tabel 2.56	Capaian Realisasi Anggaran Program Pendidikan Tahun 2022...	II-67
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tahun 2022	II-68
Tabel 2.58	Capaian Realisasi Anggaran Program Kesehatan Tahun 2022...	II-71
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan Tahun 2022	II-72
Tabel 2.60	Capaian Realisasi Anggaran Program PU dan Penataan Ruang Tahun 2022	II-76
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Utama PU dan Penataan Ruang Tahun 2022	II-77
Tabel 2.62	Capaian Realisasi Anggaran Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022	II-79
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Utama Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022	II-80
Tabel 2.64	Capaian Realisasi Anggaran Program Ketenaga Kerjaan Tahun 2022	II-82
Tabel 2.65	Capaian Indikator Ketenaga Kerjaan Tahun 2022	II-82
Tabel 2.66	Capaian Realisasi Anggaran Program Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2022	II-84
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Utama Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2022	II-84
Tabel 2.68	Capaian Realisasi Keuangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	II-85
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Utama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	II-86
Tabel 2.70	Capaian Realisasi Keuangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022	II-86
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022	II-87
Tabel 2.72	Capaian Realisasi Keuangan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022	II-88
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Utama Penanaman Modal Tahun 2022	II-88
Tabel 2.74	Capaian Realisasi Anggaran Program Perhubungan Tahun 2022	II-91
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Utama Perhubungan Tahun 2022	II-91

Tabel 2.76	Capaian Realisasi Anggaran Program Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	II-92
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Utama Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	II-93
Tabel 2.78	Capaian Realisasi Anggaran Program Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	II-95
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Utama Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	II-96
Tabel 2.80	Capaian Realisasi Anggaran Program Pertanian dan Peternakan Tahun 2022	II-99
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Utama Pertanian dan Peternakan Tahun 2022	II-100
Tabel 2.82	Capaian Realisasi Anggaran Program Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2022	II-102
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2022	II-103
Tabel 2.84	Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2022	II-104
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Utama Perencanaan Tahun 2022	II-105
Tabel 2.86	Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2022	II-106
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Utama Keuangan Tahun 2022	II-106
Tabel 2.88	Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2022	II-107
Tabel 2.89	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepegawaian Tahun 2022	II-108
Tabel 2.90	Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Pengawasan Tahun 2022	II-108
Tabel 2.91	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan	II-110
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/Kota Morowali (miliar rupiah), 2017–2021	III-1
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/ Kota Morowali (miliar rupiah), 2017–2021	III-2
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten/ Kota Morowali (miliar rupiah), 2017–2021	III-3
Tabel 3.4	Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022	III-4
Tabel 3.5	Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022	III-5
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022	III-10
Tabel 3.7	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022	III-11

Tabel 3.8	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022	III-12
Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali ...	IV-2
Tabel 4.2	Keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD 2018 2023 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022	IV-5
Tabel 4.3	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2022	IV-11
Tabel 4.4	Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022	IV-13
Tabel 4.5	Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-56
Tabel 5.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah	V-2

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1	keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya 1-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi..... II-2
Gambar 2.2.	Peta Kemiringan II-4
Gambar 2.3	Peta Topografi II-4
Gambar 2.4	Peta Geologi II-6
Gambar 2.5	Peta Hidrologi II-7
Gambar 2.6	Peta Cekungan Air Tanah II-7
Gambar 2.7	Kondisi Iklim Morowali 2018..... II-8
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan..... II-9
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan..... II-9
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana..... II-21
Gambar 2.11	Grafik PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali 2015 – 2019 II-29
Gambar 2.12	Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2014-2021 II-32
Gambar 2.13	Persentase Pendapatan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2022 II-62
Gambar 2.14	Persentase Belanja APBD Kabupaten Morowali Tahun 2022..... II-65
Gambar 2.15	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Target RPJMD II-65
Gambar 2.16	Capaian Indikator Pendidikan APK/APM Berdasarkan Target RPJMD II-66
Gambar 2.17	Capaian Indikator Pendidikan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Target RPJMD II-66
Gambar 2.18	Capaian Indikator Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Target RPJMD II-67
Gambar 2.19	Capaian Realisasi Usia Harapan Hidup Berdasarkan Target RPJMD II-69
Gambar 2.20	Capaian Realisasi Angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita dan angka kematian neonatal per 100 kelahiran Hidup Berdasarkan Target RPJMD II-70
Gambar 2.21	Capaian Realisasi Angka Stunting Berdasarkan Target RPJMD II-71

Gambar 2.22	Capaian Realisasi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Berdasarkan RPJM	II-74
Gambar 2.23	Capaian Realisasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Berdasarkan RPJM	II-74
Gambar 2.24	Capaian Realisasi Rasio Jaringan Irigasi Berdasarkan RPJMD...	II-75
Gambar 2.25	Capaian Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Berdasarkan RPJM	II-75
Gambar 2.26	Capaian Realisasi Rumah Layak Huni Berdasarkan RPJMD	II-78
Gambar 2.27	Capaian Realisasi Rumah Tangga Miskin Pengguna Listrik Berdasarkan RPJMD	II-79
Gambar 2.28	Capaian Realisasi Indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) Berdasarkan RPJMD	II-81
Gambar 2.29	Capaian Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Berdasarkan RPJMD	II-81
Gambar 2.30	Capaian Realisasi Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM non BPR/LKM Aktif Berdasarkan Target RPJMD	II-83
Gambar 2.31	Capaian Realisasi Jumlah Kapal Berangkat, Jumlah Barang Turun, Jumlah Penumpang Naik dan Jumlah Penumpang Turun Berdasarkan Target RPJMD	II-89
Gambar 2.32	Capaian Realisasi Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Berdasarkan Target RPJMD	II-90
Gambar 2.33	Capaian Realisasi Pemasangan Rambu-Rambu Berdasarkan Target RPJMD	II-90
Gambar 2.34	Capaian Realisasi Nilai Tukar Nelayan Berdasarkan Target RPJMD	II-94
Gambar 2.35	Capaian Produksi Perikanan Berdasarkan Target RPJMD	II-94
Gambar 2.36	Capaian Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Berdasarkan Target RPJMD	II-97
Gambar 2.37	Capaian Nilai Tukar Petani Berdasarkan Target RPJMD	II-97
Gambar 2.38	Capaian Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Berdasarkan Target RPJMD	II-98
Gambar 2.39	Capaian Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata Berdasarkan Target RPJMD	II-101
Gambar 2.40	Capaian Realisasi Jumlah Objek Wisata Berdasarkan Target RPJMD	II-101
Gambar 3.1	Perkembangan LPE (%) Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021.	III-4
Gambar 3.2	PDRB Per Kapita ADHB dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2017-2022.....	
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022	III-6
Gambar 3.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022	III-7
Gambar 3.5	Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022	III-8



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	iv-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Periode 2018-2023 yang disusun melalui proses klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu, terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke empat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Perangkat Daerah Tahun 2022.

Mengingat Perubahan RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Perubahan RKPD 2022 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, Perubahan RKP Tahun 2022, RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD Kabupaten Morowali, Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali, dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terutama dilihat dari keterkaitan

prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan Perubahan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan Perubahan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan Perubahan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Latar belakang perubahan RKPD Kabupaten Morowali tahun 2022, yaitu :

1. Adanya Kenaikan penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil laporan keuangan tahun 2021
2. kenaikan pendapatan / belanja dari dana perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

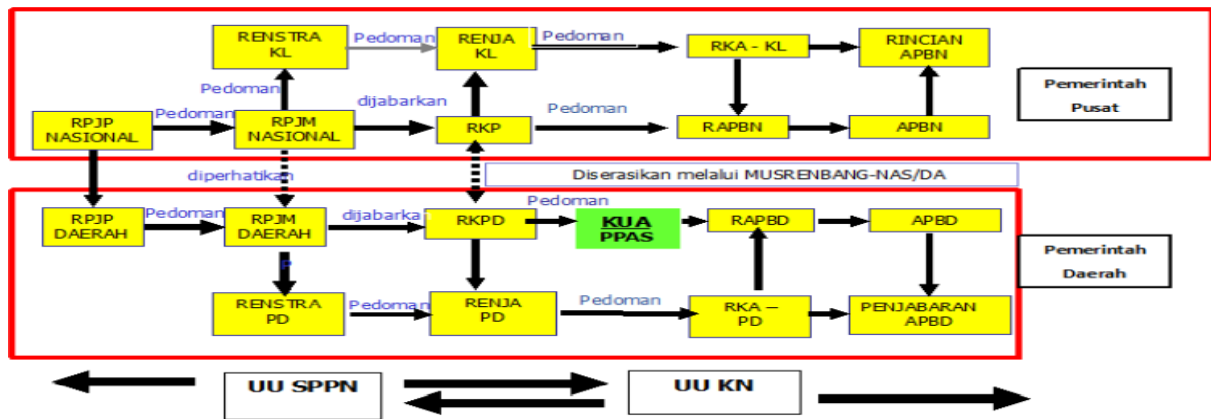
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 288,);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 112,25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022:
25. Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. Perubahan RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Perubahan RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) P-RPJMD, (3) P-Renstra-PD, (4) P-RKPD dan (5) P-Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Perubahan RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada P - RPJMD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja PD yang disusun sesuaidengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPD nantinya dijabarkan ke dalam P-RAPBD dengan berpedoman jugakepada Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen Perubahan RKP Nasional Tahun 2022, Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005 - 2025, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018 - 2023. Selain itu kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kedudukan Perubahan RKPD Morowali.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Morowali dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan P-KUA dan P-PPAS Tahun 2022;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2022;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2022; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen P-RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen P-RPJMD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.1. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan P-RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan P-RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali, P-RKP/program strategis nasional, dan P-RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk penyusunan P-RKPD Kabupaten Morowali.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen P-RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen P-RKPD bagi daerah.

1.4. Sistematika Dokumen P-RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen P-RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan II) Tahun Berkenaan

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P-RKPD tahun lalu dan realisasi P-RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen P-RPJMD Kabupaten Morowali.

1.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Sulawesi Tengah dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2022, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2022. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.3. Arah Pembangunan Kewilayah

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Morowali yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kabupaten Morowali.

5.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Secara Adiministrasi Kabupaten Morowali memiliki batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; - Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali (2021), luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari total wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada Tabel 2.1 Berikut ini :

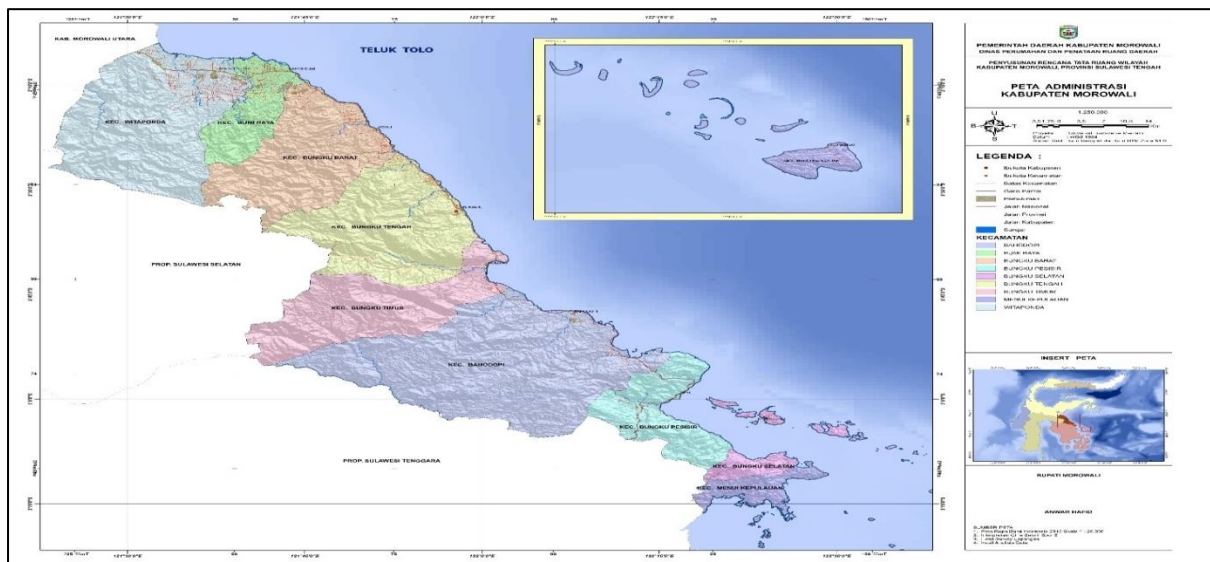
Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Menui Kepulauan	223,63	4,09	23/1	Ulunambo	99
Bungku Selatan	403,90	7,38	26	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,75	12	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,22	13	Bahonsuai	48
Witaponda	519,70	9,50	9	Laantula Jaya	61
Luas Kabupaten	5.472,00	100,00	133		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 9 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui

Kepulauan. Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali, selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.1. Peta Administrasi

2.1.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31'12" Lintang Selatan dan 03°46' 48" Lintang Selatan serta antara 121°02' 24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

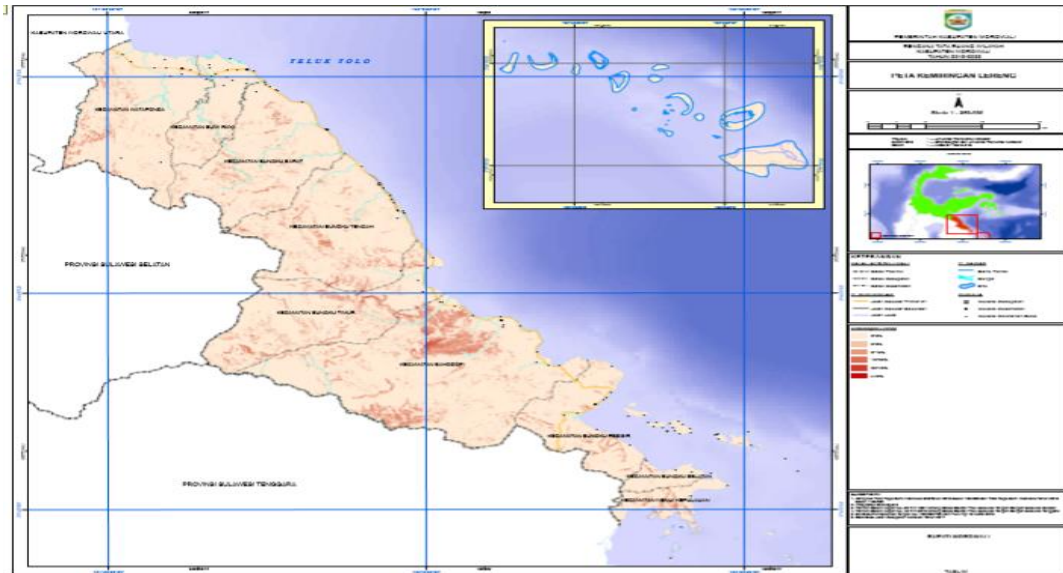
Selengkapnya dapat duraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang

mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

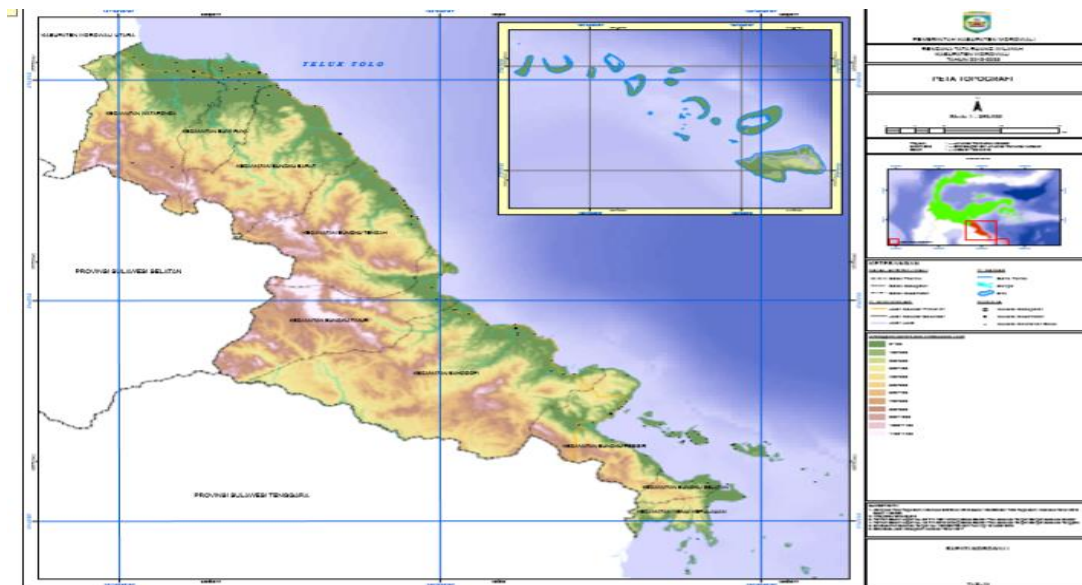
Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 %luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah

pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar. selengkapnya tertera pada peta Topografi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.2 Peta Topograpi dan Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng berikut ini :



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.2. Peta Kemiringan



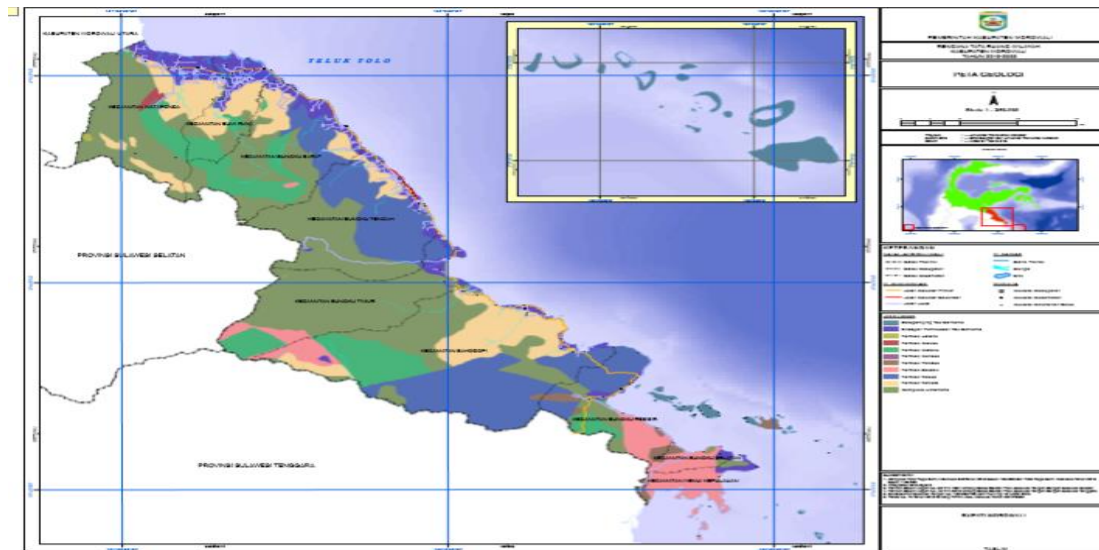
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.3. Peta Topografi

2.1.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: □ Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; □ Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; □ Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; □ Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan (Morowali). Selengkapnya tertera pada peta Geologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.4



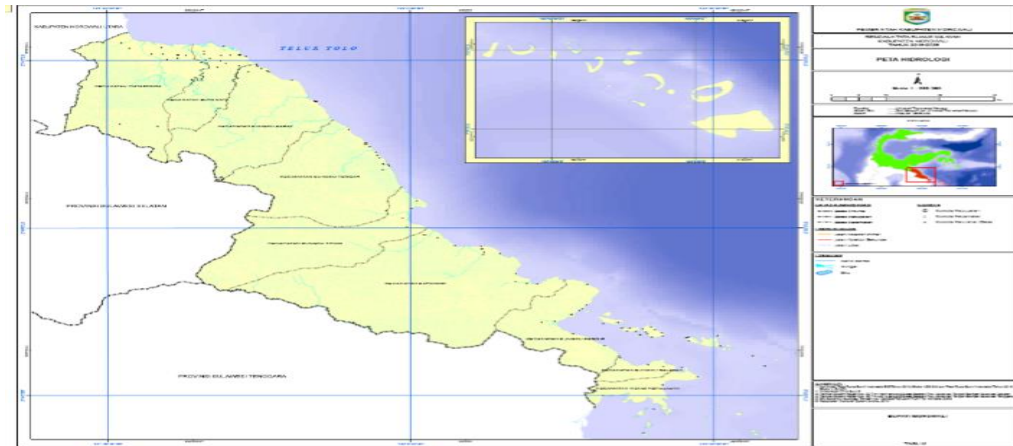
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.4. Peta Geologi

2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Selengkapnya dijelaskan pada peta Hidrologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.5

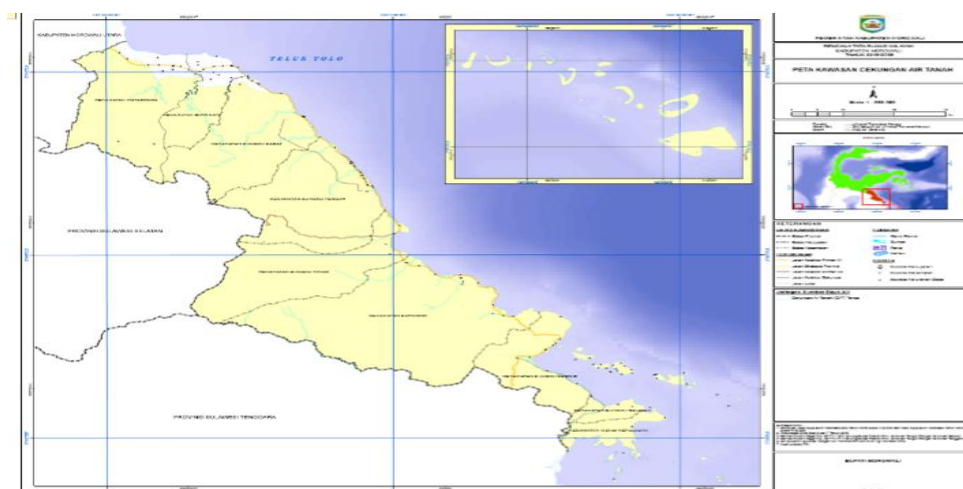


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.5. Peta Hidrologi

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada Gambar 2.6



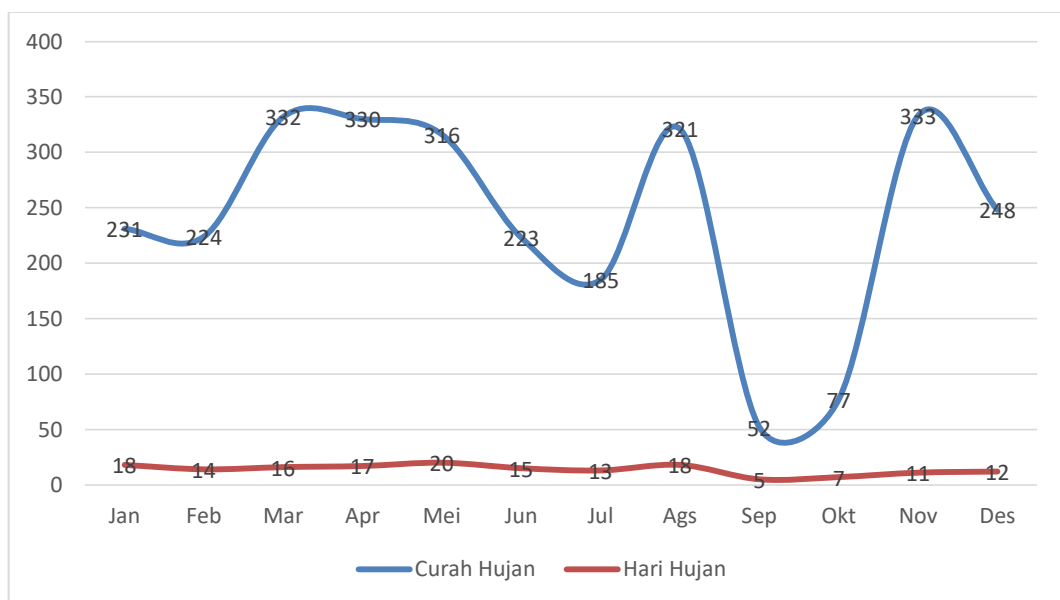
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah

2.1.1.1.6. Klimatologi

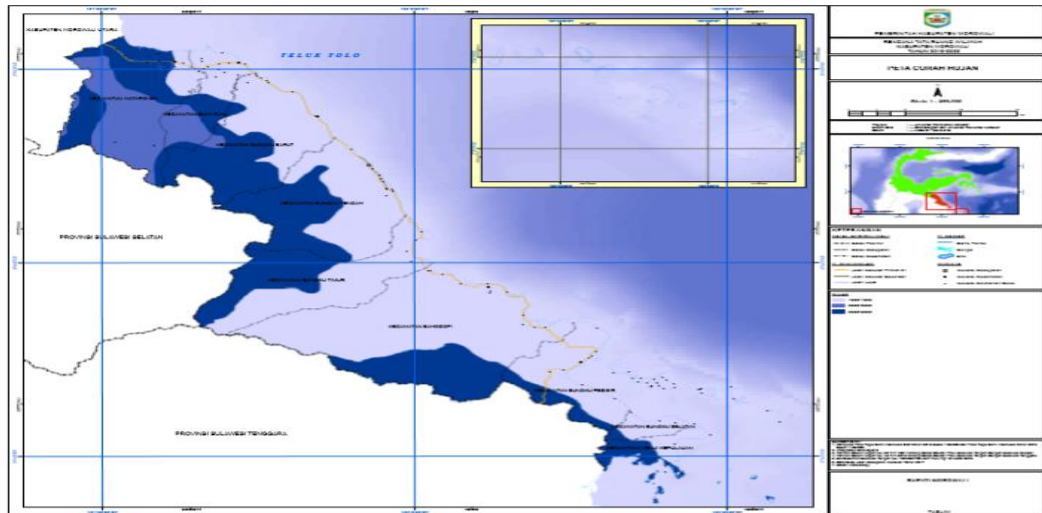
Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di manfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm3 dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm3 selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm3 selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm3 selama 7 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan gambar 2.8 peta Klimatologi Kabupaten Morowali



Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka, Tahun 2019

Gambar 2.7. Kondisi Iklim Morowali 2018

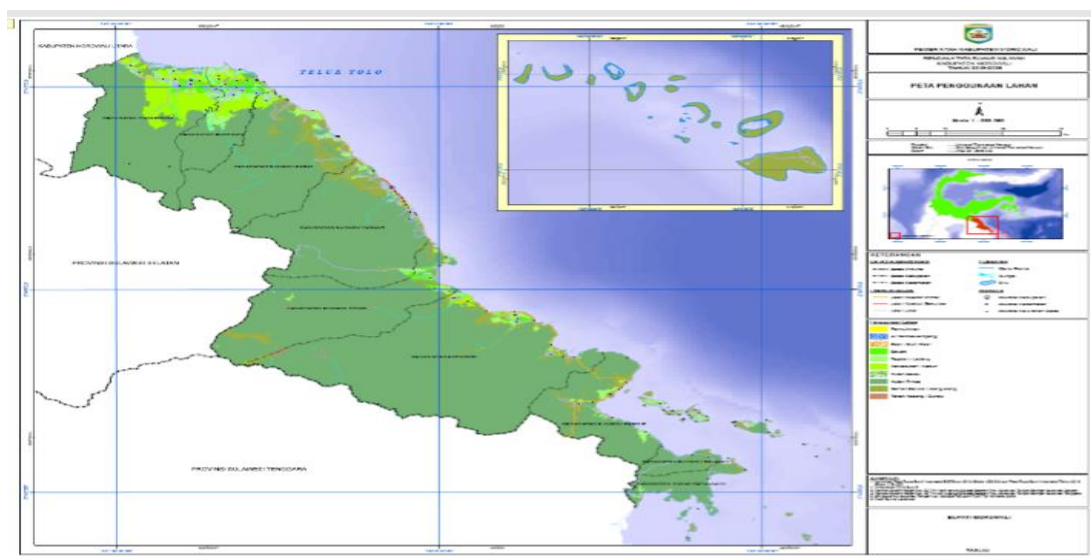


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.8. Peta Curah Hujan

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan. Selengkapnya dijelaskan pada tabel 2.3 dan peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali pada Gambar 2.9.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan

2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 .

Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat di kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
- f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan

- Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
 - i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
 - k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
 - l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan

Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;

- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali disetiap kecamatan, Batu gunung disetiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
- q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
- s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafo baho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo–Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b).

Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;

- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
- w. Rencana kawasan potensi parawisata lainnya di setiap kecamatan;
- x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 10. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan

Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

2.1.1.1.9.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang). Luas lahan padi (Ha) menurut jenis irigasi dan jenis padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali,
Tahun 2016-2021

Jenis Tanaman	Tahun (Ha)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	10.767,6	9.588,2	10.695,50	11.264,30	9.852,00	9.433,00
Jagung	1.112,6	784,4	1.530,40	1.179,70	1.814,40	1.040,10
Ubi Kayu	113,0	123,00	160,00	144,00	173,00	224,50
Ubi jalar	66,0	42,50	46,50	38,50	68,90	87,00
Kacang Tanah	45,0	32,0	51,50	52,50	53,00	69,90
Kacang Kedelai	192,0	26,0	1.543,70	61,00	229,00	190,00
Kacang Hijau	45,9	18,0	137,80	61,00	73,40	57,50

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.2, luas panen tanaman padi di Kabupaten Morowali tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9.433,00 Ha, di mana pada tahun sebelumnya Tahun 2020 seluas 9.852,00 Ha, demikian pula halnya dengan tanaman pangan lainnya juga mengalami penurunan seperti jagung, kedelai, kacang hijau. Namun di beberapa komoditas palawija luas panen mengalami peningkatan seperti ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Akan tetapi dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 luas panen tanaman padi tertinggi yaitu di Tahun 2019 sebesar 11.264,30 Ha.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi padi dan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021 menurut jenis (ton) dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3, produksi tanaman padi tertinggi yaitu sebesar 54.890,93 ton pada Tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 52.119,93 ton, namun kembali menurun hingga Tahun 2020 menjadi 44.915,27 ton, dan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 46.221,70 Ton. Sama halnya dengan tanaman padi, jumlah produksi tanaman kacang kedelai tertinggi yaitu sebesar 2.046,95 ton pada Tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 34,5 ton, namun kembali menurun menjadi 190,00 ton Tahun 2021.

Tabel 2.3

Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2021

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	51.038,4	46.723,3	52.119,17	54.890,93	44.915,27	46.221,70
Jagung	5.077,9	2.898,4	5.654,83	4.358,99	80.190,58	4.368,42
Ubi Kayu	2.046,5	3.280,3	4.267,04	3.840,34	4.823,76	6.259,73
Ubi jalar	794,2	553,9	605,76	501,54	1.091,51	1.378,25
Kacang Tanah	54,6	40,3	64,84	66,10	59,47	78,43
Kacang Kedelai	236,5	34,5	2.046,95	80,89	303,88	190,00
Kacang Hijau	36,8	14,4	110,52	48,92	57,99	45,43

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Untuk jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021, secara keseluruhan mengalami penurunan produksi seperti padi,

jagung dan kacang kedelai masing-masing menurun dari 51.038,4 ton, 5.077,9 ton dan 236,5 Ton tahun 2016, menjadi 46.221,70 ton, 4.368,42 ton dan 190,00 ton pada Tahun 2021. Sebaliknya, Tanaman ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2021 masing-masing mencapai 6.259,73 Ton, 1.378,25 Ton dan 78,43 Ton.

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun.

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tanaman cabe rawit dan terung merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali. Selain potensi tanaman hortikultura jenis sayuran, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi produksi tanaman buah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama

Jenis Tanaman	Produksi (Ku)				
	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bawang Merah	126	34	143	268	2.142,00
Cabe Rawit	5.161	5.87	2.624	8.516	9.619,00
Tomat	1.414	1.774	1.458	5.142	3.818,50
Kacang Panjang	-	2.505	1.54	3.351	3.431,40
Kangkung	-	2.5	1.138	3.259	3.499,10
Terung	-	2.201	1.554	2.745	3.984,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2021

Tabel 2.5
Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Buah

Jenis Tanaman	Produksi (Ku)				
	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mangga	6.993	6.593	3.350	707	1.043,10
Durian	10.315	5.551	2.625	222	140
Jeruk Siam	884	474	286	428	776,2
Pisang	9.121	8.133	10.073	7.250	5.236,91
Pepaya	2.361	2.769	2.438	1.167	-
Salak	55	66	17	36	34,9
Rambutan	-	3.140	491	1.234	337,76
Langsat	-	8.605	5.667	2.425	4.620,00
Nangka	-	3.775	1.186	1.254	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2021

2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

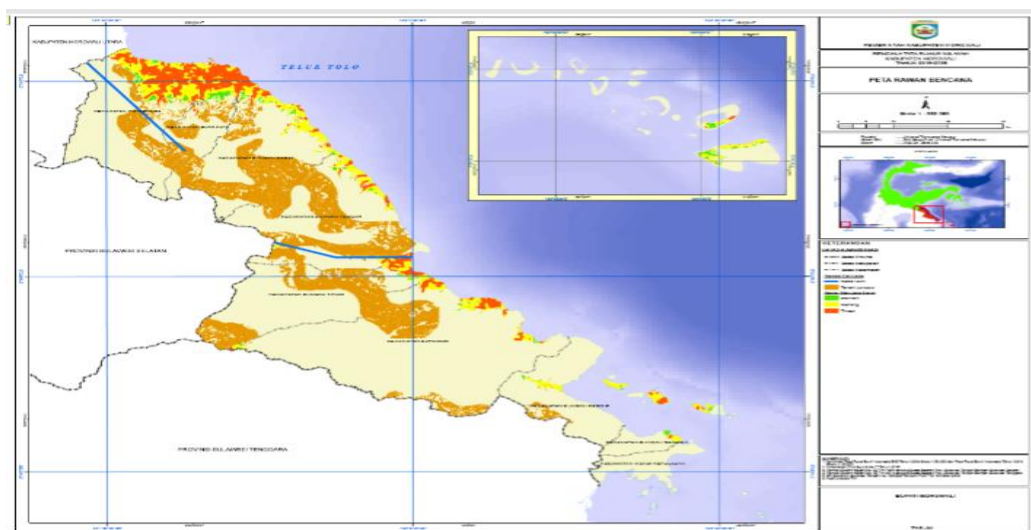
Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering

terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Pada Gambar 2.11

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman

kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebanyak 121.296 jiwa meningkat sebesar 14,30 persen pada Tahun 2020 menjadi 161.727 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 161.727 jiwa pada Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,92 persen antara Tahun 2010-2018 dan 0,953 persen antara 2010-2020.

Tabel 2.6

Laju Pertumbuhan Penduduk, kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2010-2020

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Persentase Penduduk	
		2010	2019	2020	2010–2018	2010–2020	2010	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menui Kepulauan	12.064	13.609	13.232	1,35	0,991	11,8	8,18
2	Bungku Selatan	17.273	14.831	13.914	-1,68	-0,021	16,90	8,60
3	Bahodopi	6.594	7.754	37.322	1,82	0,811	6,45	23,08
4	Bungku Pesisir	-	4.745	6.625	-	...2	-	4,10
5	Bungku Tengah	27.774	26.193	29.203	-0,65	0,995	27,17	18,12
6	Bungku Timur	-	8.989	12.061	-	...2	-	7,46
7	Bungku Barat	10.093	12.331	14.061	2,25	0,966	9,87	8,69
8	Bumi Raya	11.488	12.952	14.524	1,34	0,976	11,24	8,98
9	Witaponda	16.942	19.892	20.686	1,80	0,980	16,57	12,79
	Morowali	102.228	121.296	161.727	1,92	0,953	100,00	100,00

Sumber Morowali Dalam Angka 2021

Lanjutan Tabel 2.6

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km ²)		Rasio Jenis Kelamin		Laki-laki	Perempuan
		2010	2020	2010	2020	2020	
1	2	10	11	12	13	14	15
1	Menui Kepulauan	53,95	59,17	96,35	100,2	6,623	6,603
2	Bungku Selatan	42,77	34,45	100,94	104,8	7,121	6,793
3	Bahodopi	6,10	34,53	113,67	181,1	24,044	13,278
4	Bungku Pesisir	-	7,64	-	113,8	3,526	3,099
5	Bungku Tengah	38,28	40,34	105,25	114,8	15,661	13,641
6	Bungku Timur	-	31,15		110,2	6,322	5,739
7	Bungku Barat	13,30	18,53	111,50	115,4	7,532	6,529
8	Bumi Raya	22,76	28,77	107,81	109,0	7,576	6,946
9	Witaponda	32,60	39,80	108,59	108,6	10,769	9,917
	Morowali	18,68	29,56	104,91	122,9	89,174	72,553

Sumber Morowali Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Bahodopi sebanyak 37.322 jiwa dengan pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2019 sebesar 1,82 % dan pada tahun 2010-2020 sebesar 0,811% dengan persentase penduduk sebesar 23,08%. Sedangkan Kecamatan paling sedikit penduduknya pada tahun 2020 adalah Kecamatan Bungku Pesisir sebesar 6.625 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2020 sebesar ...2% dengan persentase penduduk sebesar 4,10%.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020, rata - rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 29,56 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan kepadatan penduduk sebanyak 40,34 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 59,17 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 7,64 jiwa per km². Untuk melihat perkembangan penduduk seluruh Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6.

2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Ratio" adalah merupakan profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas dan natalitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi keduanya semakin tinggi. Rasio penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2020 mencapai 122,9% yang artinya mayoritas penduduk Morowali adalah laki-laki. Secara keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Morowali rasio penduduknya di atas 100% dan yang tertinggi adalah Kecamatan Bahodopi dengan rasio 181,1%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.6.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah maupun kabupaten Morowali tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut diarahkan pada aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat. Suatu pembangunan akan kurang berarti apabila tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

Perekonomian Sulawesi Tengah cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat. Perlambatan tersebut terjadi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB mencapai 4,86 persen. Peningkatan ini melambat bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan laju 7,10 persen, namun salah satu Kabupaten yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Morowali dengan menempati urutan teratas di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Laju Pertumbuhan PDRB pada tahun 2018 sebesar 112,20 persen namun menurun di tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 28,93 persen Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten /Kota	ADHB (Miliar Rupiah)					ADHK (Miliar Rupiah)					Pertumbuhan (%)				
	2017	2018	2019*	2020**	2021***	2017	2018	2019*	2020**	2021***	2017	2018	2019*	2020**	2021***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Banggai Kepulauan	3.299,74	3.601,97	3.865,67	3.820,81		2.461,85	2.563,11	2.666,09	2.586,58		8,71	4,11	4,02	2,98	
Banggai	23.843,66	26.853,27	29.664,11	27.447,07		17.294,28	18.360,50	19.512,50	18.579,16		6,00	6,17	6,27	4,78	
Morowali	17.035,85	37.356,48	45.229,73	61.985,63	72.884,37	13.363,84	28.358,40	34.085,70	43.947,50	54.806,24	6,26	112,20	20,20	28,93	10-15
Poso	8.021,44	8.687,02	9.466,92	9.219,87		5.744,15	6.098,17	6.476,30	6.224,31		4,00	6,16	6,20	3,89	
Donggala	10.765,79	11.260,13	12.110,73	11.720,48		7.961,07	8.165,23	8.522,09	8.107,03		5,08	2,56	4,37	4,87	
Toli - Toli	7.137,85	7.866,88	8.452,10	8.326,92		5.193,13	5.467,26	5.779,04	5.539,12		5,31	5,28	4,79	3,31	
Buol	5.146,51	5.521,97	5.719,68	5.644,14		3.765,18	3.873,90	3.961,65	3.847,27		14,08	2,89	2,27	2,89	
Parigi Moutong	15.802,17	16.971,88	17.834,98	17.182,67		11.143,11	11.424,82	11.689,90	11.114,29		6,02	2,53	2,32	4,92	
Tojo Una-Una	4.989,82	5.302,05	5.691,81	5.586,54		3.571,75	3.668,56	3.847,33	3.723,86		6,10	2,71	4,87	3,21	
Sigi	7.876,67	8.422,17	8.964,95	8.985,82		5.770,00	5.993,14	6.207,21	6.084,93		5,53	3,87	3,57	1,97	
Banggai Laut	2.006,46	2.233,05	2.379,65	2.332,41		1.542,83	1.617,64	1.674,27	1.601,65		5,26	4,85	3,50	4,34	
Morowali Utara	8.968,53	10.161,29	11.091,33	11.203,76		6.578,53	7.691,89	8.090,29	8.072,84		5,62	16,92	5,18	0,22	
Kota Palu	20.416,02	22.726,17	25.046,37	24.175,89		14.585,80	15.315,03	16.203,29	15.467,48		6,13	5,00	5,79	4,54	
Sulawesi Tengah	133.951,16	167.135,77	185.740,09	197.440,78		97.474,86	117.555,83	127.935,06	134.152,69		7,10	20,60	8,83	4,86	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel diatas kemampuan perekonomian Tahun 2018 di Sulawesi Tengah ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 167.135,77 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 133.951,16 miliar rupiah. Sedangkan ditinjau atas dasar harga konstan 2010, PDRB Sulawesi Tengah tahun 2018 mencapai 117.555,83 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 97.474,86 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali tahun 2020 mencapai 28,93 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 20,20 persen. Adapun PDRB kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Morowali Menurut Lapangan Usaha(persen), 2016—2020

No	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4,12	3,59	1,28	1,84	-2,76
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	15,93	15,93	51,25	19,77	34,40
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	27,6	21,90	277,16	24,00	35,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	11,71	14,07	15,25	1,98	4,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	8,23	9,53	5,17	0,17	0,11
F	Konstruksi/Construction	-8,68	6,81	6,27	13,31	-14,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	9,92	6,23	5,81	2,90	-4,98
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	7,29	6,42	3,42	6,47	-28,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	5,43	6,99	-5,26	4,01	-10,48
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	9,16	9,16	12,87	6,80	7,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	9,81	7,23	5,29	0,17	13,23
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,01	2,76	2,12	0,90	0,15
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,92	9,22	-10,02	4,98	-1,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	6,04	7,42	2,83	5,05	1,06

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2021

Tabel 2.8 menjelaskan dari 15 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan negative. Dari 15 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,94 persen, Industri Pengolahan 17,33 persen, Konstruksi 13,31 persen, Transportasi dan Pergudangan 14,58 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 7,52 persen, Jasa Perusahaan 8,63 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,89 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,40 persen.

Sedangkan satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Real Estate 2,51 persen, dan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan sebesar 2,85 persen, Pengadaan Listrik dan Gas 1,85 persen, Perdagangan Besar dan Eceran 4,74 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,28 persen, Informasi dan Komunikasi 1,19 persen, Jasa Pendidikan 4,49 persen dan Jasa lainnya 2,10 persen

2.1.2.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 18,63 persen, yakni dari 20.507 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 24.327 miliar Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih kecil, yakni

dari 15.021 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 17.200 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 14,51 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Morowali periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 67,82 persen; 12,42 persen; 14,08 persen; 12,40 persen; dan 14,51 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang selalu tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 12.818 miliar Rupiah (2015); 14.533 miliar Rupiah (2016); 17.036 miliar Rupiah (2017); 20.507 miliar Rupiah (2018); dan 24.327 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Morowali pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.9 dan grafik 2.11 berikut ini:

Tabel 2.9.
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Morowali 2015 – 2019 (Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.326	3.640	4.006	4.495	5.034
2. Konsumsi LNPRT	77	86	98	117	138
3. Konsumsi Pemerintah	596	629	701	712	798
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.332	9.639	10.898	11.503	19.844
5. Perubahan Inventori	810	1.477	560	2.430	-148
6. Net Ekspor	-322	-938	773	1.251	-1.340
PDRB	12.818	14.533	17.036	20.507	24.327

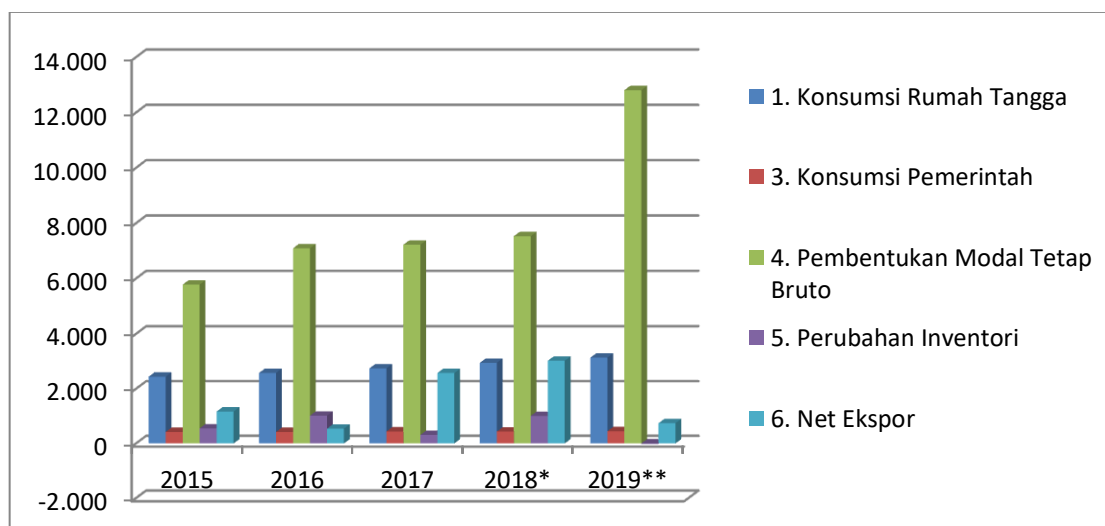
Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Morowali pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.10 dan gambar grafik 2.11 berikut ini:

Tabel 2.10
PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Morowali 2015 – 2019 (Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.442	2.581	2.748	2.950	3.138
3. Konsumsi Pemerintah	421	421	439	432	447
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.780	7.093	7.224	7.530	12.809
5. Perubahan Inventori	552	1.018	310	1.009	-19
6. Net Ekspor	1.168	542	2.577	3.024	740
PDRB	10.420	11.714	13.364	15.021	17.200

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020



Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

Gambar 2.11.

Grafik PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali
2015 – 2019

Dari tabel 2.11, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Morowali meningkat, yakni sebesar 10.420 miliar Rupiah (2015); 11.714 miliar Rupiah (2016); 13.364 miliar Rupiah (2017); 15.021 miliar Rupiah (2018); dan 17.200 miliar Rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2.14 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali cenderung meningkat, yakni dari 12,40 persen pada tahun 2018 menjadi 14,51persen pada tahun 2019.

2.1.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu inidkator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani adalah indeks nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang harus dibayar petani dikalikan dengan 100 %. Adapun Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 – 2019

Wilayah	Nilai Tukar Petani	
	2015	2019
Kab.Morowali	100.49	100,14
Prov.Sulawesi Tengah		96,22

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dari tabel 2.11 di ketahui Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali tahun 2015 yaitu sebesar 100,49 dan pada tahun 2019 menjadi 100,14. Peranan sector pertanian masih cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Morowali. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Secara agreat sudah mencapai 14,51 %. Dimana pertumbuhan sector pertanian menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2017 mencapai 3,78% menjadi 0,8 % Tahun 2018 kemudian kembali peningkatan menjadi 2,85 % pada Tahun 2019.

Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Morowali berkembang cukup pesat terutama dari pendatang, maka sector pertanian merupakan sector yang penting untuk dikembangkan lebih lagi. Hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan penduduk akan bahan pangan yang tentu mengalami peningkatan yang drastis. Jangan sampai dengan tingginya permintaan akan hasil pertanian di Kabupaten Morowali, justru tidak searah dengan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten

Morowali. Hal ini kan membahayakan pembangunan di Kabupaten Morowali sendiri dikarenakan potensi sektor pertanian cukup besar malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.2.2.1. Gini Ratio

Gini Ratio adalah Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Adapun Indeks Gini ratio Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

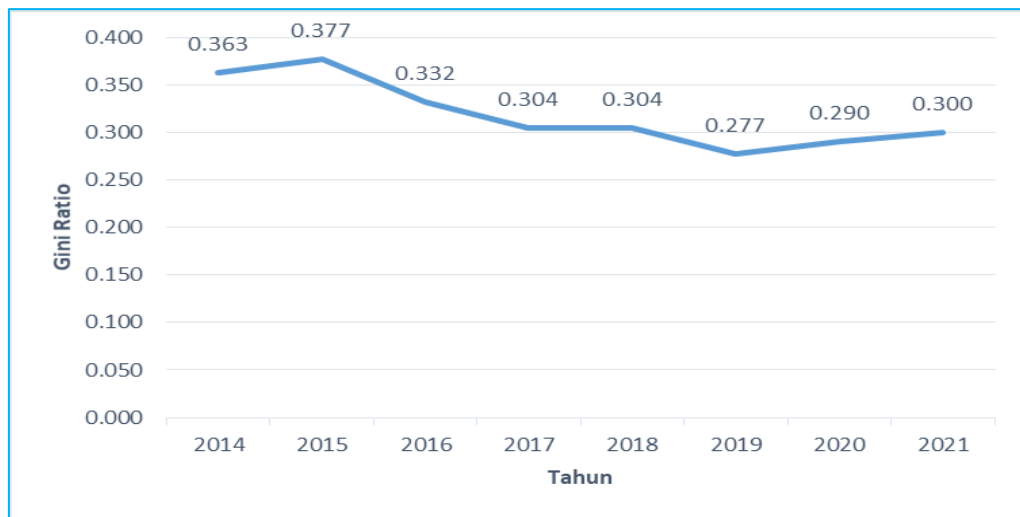
Tabel 2.12
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Sulawesi Tengah,
2012-2021

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banggai Kepulauan	0,338	0,315	0,301	0,320	0,302	0,338	0,345			
Banggai	0,374	0,407	0,317	0,321	0,319	0,302	0,311			
Morowali	0,371	0,396	0,363	0,377	0,332	0,304	0,304	0,277	0,290	0,300
Poso	0,331	0,304	0,317	0,382	0,357	0,302	0,300			
Donggala	0,329	0,260	0,274	0,312	0,316	0,348	0,326			
Tolitoli	0,329	0,337	0,334	0,306	0,375	0,382	0,369			
Buol	0,368	0,321	0,336	0,307	0,313	0,329	0,348			
Parigi Moutong	0,310	0,300	0,289	0,343	0,310	0,304	0,305			
Tojo Una-una	0,341	0,340	0,339	0,338	0,338	0,330	0,313			
Sigi	0,337	0,357	0,310	0,330	0,315	0,330	0,303			
Banggai Laut	-	-	-	0,308	0,306	0,307	0,307			
Morowali Utara	-	-	-	0,337	0,335	0,336	0,314			
Kota Palu	0,369	0,410	0,397	0,430	0,363	0,358	0,357			
Sulawesi Tengah	0,374	0,389	0,362	0,374	0,362	0,355	0,346			

Sumber: Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.18 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pada Tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,346. Angka ini relatif stagnan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2017 yang sebesar 0,355, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,346, angka tersebut turun sebesar 0,019 poin. dibandingkan dengan Kabupaten lainnya Kabupaten Morowali masih berada pada Tingkat ketimpangan rendah hal ini disebabkan karena Gini ratio Kabupaten Morowali pada Tahun 2016 sebesar 0,332 dan untuk tahun 2017 mencapai 0,304 sedangkan tahun 2018 tetap dengan nilai 0,304. Namun Gini ratio

di Kabupaten Morowali di tahun 2018 berada di urutan ketiga setelah kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Kemudian pada tahun 2019 untuk pertama kali ketimpangan masuk golongan relatif rendah dengan angka 0,277, kemudian naik menjadi 0,290 tahun 2020. Namun meningkat kembali menjadi 0,300 tahun 2021 yang termasuk golongan ketimpangan relatif sedang.



Sumber Data : Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2021

Gambar 2.12
Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2014-2021

Jika dilihat dari gambar 2.12 diatas, terlihat bahwa Gini Ratio Kabupaten Morowali dari tahun 2015 – 2019 memiliki trend menurun. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 – 2021 menjadi 0,300. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena disaat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sedang tinggi namun distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat malah semakin kurang merata. Ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif dan diharapkan bisa terus meningkat, distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Morowali ternyata semakin timpang.

2.1.2.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif. Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatannya dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lainnya. Adapun kondisi kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)				Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Banigai Kepulauan	317.475	317.475			18,56	18,38	17,54			15,92	15,65	14,84		
Banggai	373.695	373.695			33,5	33,72	29,30			9,20	9,12	7,80		
Morowali	402.292	402.292	428.744	-	16,99	17,03	16,61	16,50	85.456	14,55	14,34	13,75	13,43	13,75
Poso	449.834	449.834			41,88	41,75	39,92			17,16	16,71	15,65		
Donggala	308.212	308.212			54,44	54,28	55,83			18,17	18,03	18,40		
Tolit-toli	299.052	299.052			30,64	31,79	30,79			13,3	13,66	13,09		
Buol	332.163	332.163			25,76	25,39	24,51			16,65	16,08	15,19		
Parigi Moutong	388.440	388.440			82,88	83,66	81,36			17,55	17,41	16,64		
Tojo Una-Una	442.186	442.186			27,3	27,78	26,36			18,15	18,27	17,16		

Sigi	316.949	316.949			29,55	29,78	30,82			12,66	12,6	12,91		
Banggai Laut	324.734	324.734			11,63	11,97	11,46			16,17	16,32	15,34		
Morowali Utara	412.942	412.942			19,25	19,4	19,25			15,73	15,53	15,08		
Kota Palu	492.085	492.085			25,49	25,26	26,62			6,74	6,58	6,83		
Sulawesi Tengah	413.785	413.785			417,87	420,21	410,36	398,73		14,14	14,01	13,48	12,92	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 2.13, terjadi kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 402.292 menjadi menjadi Rp. 428.744 pada tahun 2019, yang artinya bahwa apabila pengeluaran dalam satu bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor lainnya. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Morowali meningkat menjadi 13,75% dari tahun 2020 13,43%, hal ini disebabkan oleh tingginya beban pengeluaran masyarakat yang tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan akibat adanya pandemi Covi-19, juga tingkat pengangguran yang tinggi karena adanya ketambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

2.1.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia dengan nilai IPM berkategori 'Sedang'. IPM yang dicapai Sulawesi Tengah Tahun 2020 tercatat sebesar 69,55. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.14.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah, Menurut Kabupaten/Kota, 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	63,45	64,07	64,68	65,13	65,42	65,61
Banggai	68,17	69,00	69,85	70,36	70,52	70,60
Morowali	69,69	70,41	71,14	72,02	72,21	72,29
Poso	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28	71,45
Donggala	64,42	64,66	65,14	65,49	65,56	65,72
Toli-toli	63,27	64,05	64,60	65,42	65,69	66,30
Buol	66,37	66,69	67,30	67,69	67,82	68,25
Parigi Moutong	63,60	64,09	64,85	65,47	65,44	65,82
Tojo Una-una	62,27	62,61	63,38	64,52	64,59	64,74
Sigi	65,95	66,72	67,66	68,16	68,12	68,49
Banggai Laut	63,49	64,08	64,80	65,27	65,43	65,65
Morowali Utara	66,57	67,35	67,95	68,45	68,36	68,48
Kota Palu	79,73	80,24	80,91	81,50	81,47	81,70

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.14 menunjukkan nilai pertumbuhan IPM Kabupaten Morowali berada pada urutan ke dua setelah kota palu sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2016 dengan nilai 69, 69 % sedangkan pada tahun 2021 yaitu mencapai 72,29 % sehingga mengalami perubahan status dari “ Sedang “ menjadi “Tinggi” dengan adanya perubahan status ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). adapun Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Komponen
dan Kabupaten/Kota, 2017 – 2021

KABUPATEN/KOTA	Umur Harapan Hidup (Tahun)					Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Banggai Kepulauan	64,53	65,12				13,03	13,04			
Banggai	70,02	70,32				12,89	13,22			
Morowali	68,07	68,45	68,82	NA	69,18	12,77	12,89	13,33	NA	13,34
Poso	70,16	70,51				13,38	13,68			
Donggala	65,89	66,37				12,46	12,47			
Tolitoli	64,12	64,71				12,7	12,71			
Buol	67	67,59				13,06	13,07			
Parigi Moutong	63,19	63,57				12,44	12,45			
Tojo Una-una	64,07	64,61				11,81	11,82			
Sigi	68,72	69,15				12,51	12,85			
Banggai Laut	63,62	64,21				12,87	12,88			
Morowali Utara	68,34	68,77				12,21	12,22			
Kota Palu	69,93	70,31				15,92	16,2			
Sulawesi Tengah	67,32	67,78				13,04	13,13			
Nasional	71,06	71,2				12,85	12,91			

Lanjutan Tabel 2.15

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribu Rupiah)				
2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
12	13	14	15	16	12	13	14	15	16
7,99	8,14				7.440	7.545			
7,92	8,06				9.516	9.712			
8,73	8,98	9,11	NA	9,33	11.012	11.159	11.277	NA	NA
8,81	9,04				8.781	8.936			
7,84	7,85				7.924	8.106			
7,85	7,96				7.916	8.017			
8,63	8,74				7.934	8.079			
6,98	7,18				9.488	9.808			
7,9	8,16				7.465	7.608			
8,22	8,43				8.113	8.236			
8,21	8,44				7.693	7.810			
8,39	8,58				8.842	8.985			
11,26	11,33				14.871	15.074			
8,29	8,52				9.311	9.488			
8,1	8,17				10.664	11.059			

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jika dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, secara umum Kabupaten Morowali mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan di suatu wilayah, baik

dari sisi sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Pada tahun 2019, UHH Kabupaten Morowalu mencapai 68,82 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,82 tahun. Kecenderungan Umur Harapan Hidup tahun 2011-2019 di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir hidup diharapkan dapat hidup lebih lama karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Dimensi kedua pembentuk IPM yaitu pengetahuan yang diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Secara umum, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Morowali sebesar 13,33 tahun dan angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,11 tahun sedangkan Pada dimensi standar hidup layak, rentang nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2019 berkisar antara 11.277ribu rupiah per tahun.

2.1.2.2.4. Pengangguran

Tingkat Pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Penganggur adalah Tenaga Kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang bekerja kurang dari dua jam pada minggu yang lalu. Tingkat pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Seseorang dikatakan Bekerja bila yang bersangkutan bekerja lebih dari 2 jam pada minggu yang lalu. Rasio Orang yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Morowali yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.16.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), 2017 – 2021)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6
Banggai Kepulauan	70.72	70.18	73.55	72.97	
Banggai	69.4	71.49	66.93	69.79	
Morowali	60.72	60.8	62.6	64.7	65,55
Poso	76.84	75.48	72.36	74.78	
Donggala	60.33	63.82	65.52	63.93	
Toli-Toli	60.79	66.57	62.25	65.95	

Buol	64.56	67.02	66.93	69.75	
Parigi Moutong	67.3	72.05	68.09	72.5	
Tojo Una-Una	68.87	76.58	78.59	75.33	
Sigi	67.8	69.1	69	69.24	
Banggai Laut	62.13	69.3	65,17	67.2	
Morowali Utara	75.30	74.45	65.65	69.85	
Kota Palu	66.28	65.82	65.28	66.46	
Sulawesi Tengah	67.14	69.52	67.59	69.44	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Tabel 2.17.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6
Banggai kepulauan	3.24	3.57	2.00	2.47	
Banggai	2.94	2.95	2.18	2.42	
Morowali	2.72	2.80	2.97	5.21	4,01
Poso	3.69	2.39	2.18	2.39	
Donggala	3.32	2.77	2.76	2.58	
Toli-Toli	4.35	3.13	3.10	3.74	
Buol	4.40	4.48	4.01	4.36	
Parigi Moutong	2.66	2.67	2.36	2.70	
Tojo Una-Uno	2.88	3.68	2.92	2.84	
Sigi	5.29	3.73	2.54	3.36	
Banggai Laut	3.21	3.28	3.04	3.09	
Morowali Utara	2.00	2.13	3.05	5.16	
Kota Palu	6.56	5.73	6.32	8.36	
Sulawesi Tengah	3.81	3.37	3.11	3.77	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel 2.17 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke tiga dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali meningkat 5,21% dari 2,97% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
APM dan APK Menurut Kabupaten Morowali, 2019 – 2021

Jenjang Pendidikan	Capaian					
	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
	2019	2020	2021*	2019	2020	2021*
SD/MI/Paket A	94,79	94,72	95,55	...	108,95	107,55
SMP/MTs/Paket B	72,73	73,49	74,86	...	103,84	102,60
SMA/SMK/MA/PAket B	67,59	67,54	69,02	...	81,03	80,89

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

APM dan APK Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, capaian tersebut harus terus di jaga untuk menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat kabupaten morowali. Permasalahan lain adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Khusus pada wilayah kepulauan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan guru serta keterjangkauan dan aksesibilitas murid bersekolah. Pada beberapa wilayah kecamatan khususnya kepulauan masih banyak terdapat gedung sekolah dengan kondisi belum layak dalam menjalankan proses belajar mengajar serta belum

memadainya sarana prasarana seperti buku dan peralatan mengajar, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

2.1.3.1.1.2. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19

Angka Putus Sekolah (APS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bidang Urusan/Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,45	0,00	98,92
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	3,65	0,00	95,69
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,34	0,44	90,40

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, hal ini di sebabkan karena beberapa faktor yaitu masih adanya budaya lokal yang berpemahaman bahwa anak memiliki kewajiban membantu orang tua mencari nafkah sehingga banyak anak yang berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja padahal program pendidikan gratis telah menyentuh jenjang pendidikan SMA. Hal ini menjadi masukan untuk pemerintah provinsi dikarenakan kewenangan pendidikan SMA sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi.

2.1.3.1.1.3. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka kelulusan sekolah SD menunjukkan persentase anak yang lulus sekolah yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka kelulusan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.

Angka Kelulusan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bidang Urusan/Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Angka Kelulusan SD/MI	100		100
Angka Kelulusan SMP/MTS	100	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

2.1.3.1.1.4. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan yang kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya, misalnya tingkat kelulusan sekolah SD yang kemudian melanjutkan kejenjang sekolah SMP yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka melanjutkan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21.

Angka Melanjutkan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

2.1.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**A. Persentase Balita Stunting**

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak factor seperti kondisi social ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting dimasa yang akan datang

mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Persentase balita stunting di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22.
Presentase Balita Stunting Kabupaten Morowali
Pada Tahun (2019 -2021)

Indikator	2019		2020		2021	
	Total Balita Stunting (Orang)	persentase stunting (%)	Total Balita Stunting (Orang)	persentase stunting (%)	Total Balita Stunting (Orang)	persentase stunting (%)
Angka Stunting	1.042	12	849	7,8	556	5,2

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

B. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014), sedangkan Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 1 tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu bangsa. Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23.
Angka Kematian Ibu Bayi Kabupaten Morowali,
Pada Tahun (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13	13.5	14.5
Angka Kelangsungan hidup bayi	12.95	13.4	14.4
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran bayi	0.7	1	0.64
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	10.5	10,8	12.5
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	315	66	353

Sumber data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Angka kematian ibu/100.000 Kelahiran Hidup mengalami fluktuasi dimana Tahun 2019 kematian ibu mencapai 9 orang

(315/100.000 KH) dan menurun pada tahun 2020 berjumlah 2 orang (66/100.000 KH). Data tersebut menunjukkan adanya trend peningkatan dalam mengatasi kematian ibu dan bayi. Hal tersebut harus di pertahankan sehingga tidak terjadi kematian ibu dan bayi di karenakan pelayanan kesehatan yang kurang optimal, mengingat urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus di lakukan oleh pemerintah yang mana masyarakat memiliki hak atas setiap pelayanan kesehatan. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 11 Orang (353/100.000 KH), hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana ter standar di Puskesmas juga kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dan penerapan Inovasi Gemasebumi yang tidak diterapkan secara maksimal karena kurang keterlibatan dari lintas sekktor.

C. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Data rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24.

Data Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	0.08	0.08	0,08

Sumber data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

D. Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data rasio rumah sakit persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25.

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021

Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	0.02	0.02	0,02
--	------	------	------

Sumber data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua rumah sakit, dengan jumlah penduduk morowali 162.098 berarti satu rumah sakit melayani 81.049 penduduk. Jika melihat ideal rasio pelayanan penduduk, maka perlu adanya penambahan sarana prasarana, baik itu dari kamar pasien maupun peningkatan manajemen pelayanan sehingga bisa sejalan dengan standar pelayanan kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk melihat sejauh mana rumah sakit di gunakan oleh masyarakat, dan sejauh mana masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap.

E. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.26.

Rasio Dokter Per satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	0.32	0.32	0,32

Sumber data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00623 pada tahun 2019 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 159 penduduk. Ini kemudian menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu 0,00618 bahwa 1 tenaga paramedis melayani 161 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi penurunan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah.

F. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (1000 pddk)

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk

Tabel 2.27.

Data Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (1.000 pddk)	6.23	6.18	7,12

Sumber data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio tenaga paramedis per 1.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00623 pada tahun 2019 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 159 penduduk. Ini kemudian menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu 0,00618 bahwa 1 tenaga paramedis melayani 161 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi penurunan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah. Selanjutnya pada tahun 2021 menunjukan peningkatan yaitu 0,00712 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 140 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah.

G. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Pada prinsipnya, semua indikator pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan ibu dan bayi terjadi tren positif di Kabupaten Morowali. Adapun data cakupan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28.

Data Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100

Sumber data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Adapun yang terkait dengan indikator cakupan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29

Cakupan Indikator Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94.48	96.28	97
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	100	100	100
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	2.525	2802	2.183
Angka Kejadian Malaria	0.26	0.13	0,06
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi	100	100	100
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	100	100	100
Cakupan pembantu puskesmas	25.65	25.65	29,65
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 9(rasio kunjungan K4)	83.07	94	99
Cakupan pelayanan anak balita	65.61	56	100

2.1.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Infrastruktur Jalan

Indikator Infrastruktur jalan yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Terkait dengan ketiga indikator tersebut kondisinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.30

Data Capaian Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Pada Tahun (2019 – 2021)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Proporsi panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	31,87	35,9	36,07
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.008	0.006	0,006
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	14,53	19,98	26,82

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2022

Terjadi peningkatan yang signifikan untuk jaringan jalan dalam kondisi baik, tetapi terjadi penurunan pada rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi penduduk di kabupaten morowali sehingga perlu menjadi pertimbangan terkait populasi penduduk. Meskipun begitu program pembangunan jalan terus mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kelancaran aktivitas ekonomi.

B. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang mempunyai akses layanan sanitasi, sekurang-kurangnya memiliki fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Adapun persentase rumah tinggal bersanitasi pada Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31.

Data Capaian Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Pada Tahun (2019 – 2020)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*

Persentase rumah tinggal bersanitasi	74,58	75,13	82,84
--------------------------------------	-------	-------	-------

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi peningkatan rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2019-2020, hal ini harus terus ditingkatkan mengingat angka tersebut masih jauh dari kondisi ideal khususnya di wilayah kepulauan. Sanitasi merupakan indikator wajib atau dengan kata lain menjadi standar pelayanan minimal pemerintah daerah sehingga wajib untuk di laksanakan dan di tingkatkan kinerjanya karena dengan membaiknya sanitasi maka secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian atau kondisi angka kemiskinan masyarakat.

C. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang mempunyai layanan air bersih. Bentuk penyediaan air bersih selain pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan pemasangan pompa dan pembangunan sumur yang mana sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.32.
Data Capaian Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Pada Tahun (2019 – 2021)

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Proporsi rumah tangga pengguna air bersih (%)	45.47	44.66	90,00

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi penurunan rumah tangga pengguna air bersih sebesar 0,81 persen, maksudnya adalah adanya rumah tangga yang belum tersentuh layanan air bersih atau terbatasnya akses untuk menggunakan air bersih. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah kepulauan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di karenakan kondisi topografi kepulauan, sehingga program air bersih di wilayah kepulauan tersebut harus tepat penanganannya dan terus mengevaluasi program-program yang sudah berjalan. Hal ini harus terus di tingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi indikator kinerja wajib oleh pemerintah daerah.

D. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.

Data Capaian Rasio Jaringan Irigasi, Pada Tahun (2018 – 2021)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian			
	2018	2019	2020	2021*
Rasio Jaringan Irigasi	33,5	42,4		0,72

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat di ketahui bahwa masih besarnya kebutuhan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan lahan budidaya. Hal ini juga dapat dilihat dari produktivitas pertanian yang masih rendah, sehingga untuk meningkatkan produktivitas tersebut maka perlu adanya peningkatan jaringan irigasi untuk mencapai target produktivitas pertanian.

2.1.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman

A. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah atau tempat tinggal yang layak untuk dijadikan hunian dari sisi atap,lantai dan dinding bagi penduduk kategori rumah tangga miskin. Layak atau tidak layaknya suatu tempat tinggal dinilai berdasarkan perhitungan teknis dan peninjauan lapangan. Semua data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif sampai mencapai rumusan kesepakatan untuk menilai layak atau tidak layak rumah tersebut untuk dijadikan hunian atau tempat tinggal. Rumah layak huni di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34.

Data Rumah Layak Huni (Unit), Pada Tahun (2019 – 2021)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rumah Layak Huni (unit)	770	1.082	555

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan capaian rumah layak huni dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ini disebabkan karena adanya program unggulan pemerintah daerah untuk pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. Sehingga indikator program kegiatan ini masih butuh perhatian yang sangat tinggi guna mengejar target RPJMD tersebut dan di sisi lain indikator ini merupakan program pendukung dalam pengentasan kemiskinan. Program ini kategori berhasil, karena dengan adanya program ini maka pengentasan kemiskinan dari bidang infrastruktur dapat di atasi secara perlahan berdasarkan data angka kemiskinan. Program ini akan terus berlanjut khususnya di wilayah kepulauan.

B. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar saat ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi kabupaten morowali saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik, sehingga saat ini pemerintah daerah terus menggenjot untuk memberikan pelayanan listrik kepada daerah-daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan tren penggunaan listrik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Pada tahun (2019 – 2021)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	93	94	93-95

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali Tahun 2022

2.1.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan bidang sosial dapat dilihat dari data kemiskinan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.36.

Persentase Penduduk Miskin Pada Tahun (2019 – 2021)

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	13.75	13.43	13,75
Rasio Kesenjangan Kemiskinan/Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.5	0.67	0,32

Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan pada tabel diatas, terjadi penurunan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dimana pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, namun pada sektor perikanan di wilayah kepulauan program kegiatannya belum terlaksana dengan baik. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Morowali meningkat menjadi 13,75% dari tahun 2020 13,43%, hal ini disebabkan oleh tingginya beban pengeluaran masyarakat yang tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan akibat adanya pandemi Covi-19, juga tingkat pengangguran yang tinggi karena adanya ketambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.37.

Jumlah Angkatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Pada Tahun (2018 – 2021)

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021*
Jumlah Angkatan Kerja	16,123	53.988	57.727	NA
Tingkat Pengangguran terbuka	2,89	3,03	5,21	4,01

Sumber data: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2021

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel di atas Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali meningkat 5,21% dari 2,97% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya ketambahan jumlah penduduk dari

wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

2.1.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a) Analisis Indikator SKPG
 - Aspek Ketersediaan Pangan

Tabel 2.38
Aspek Ketersediaan Pangan

No.	KECAMATAN	Rasio Ketersediaan (r)	Skor_Pertanian
1	Menui Kepulauan	0.53	3
2	Bungku Selatan	16.33	1
3	Bahodopi	0.21	3
4	Bungku Pesisir	1.08	2
5	Bungku Tengah	0.58	3
6	Bungku Timur	2.48	1
7	Bungku Barat	3.09	1

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali (Di Olah)

Ket : ■ Aman
■ Rawan
■ Waspada

- b) Aspek Akses Pangan Tahunan
 - Data Keluarga Miskin

Tabel 2.39.
Data Keluarga Miskin

No	KECAMATAN	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Pra dan sejahtera I (Total)	% Pra dan Sejahtera I (r)	Skor_Miskin
1	Menui Kepulauan	4,122	3,048	-	3,048	74	3
2	Bungku Selatan	4,202	3,082	-	3,082	73	3
3	Bahodopi	14,529	1,232	-	1,232	8	1
4	Bungku Pesisir	1,897	1,030	-	1,030	54	3
5	Bungku Tengah	8,967	2,557	-	2,557	29	2
6	Bungku Timur	3,639	1,120	-	1,120	31	2
7	Bungku Barat	4,315	1,815	-	1,815	42	3
8	Bumi Raya	4,551	1,905	-	1,905	42	3
9	Wita Ponda	6,309	1,729	-	1,729	27	2
10	MOROWALI	52,531	17,518	-	17,518	33	2

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali (Di Olah)

Ket : ■ Aman
■ Rawan
■ Waspada

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

➤ Data Status Gizi

Tabel 2.40.

Data Status Gizi Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali

No	KECAMATAN	Total KEP	% KEP (r)	Skor KEP
1	Menui Kepulauan	4	1.01	1
2	Bungku Selatan	53	20.23	3
3	Bahodopi	14	2.88	1
4	Bungku Pesisir	13	6.10	1
5	Bungku Tengah	8	2.34	1
6	Bungku Timur	1	0.42	1
7	Bungku Barat	3	2.78	1
8	Bumi Raya	13	4.81	1
9	Wita Ponda	5	2.54	1
	MOROWALI	114	4.54	1

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Ket : Aman
 Rawan
 Waspada

d) Indek Komposit

➤ Situasi Pangan dan Gizi

Tabel 2.41.

Data Situasi Pangan Dan Gizi

No	KECAMATAN	S_Pertanian	S_Pra dan Sejahtera I	S_KEP	Skor_Komp osit	Indeks Komposit Tahunan (IKT)
1	Menui Kepulauan	3	3	1	7	3
2	Bungku Selatan	1	3	3	7	3
3	Bahodopi	3	1	1	5	3
4	Bungku Pesisir	2	3	1	6	3
5	Bungku Tengah	3	2	1	6	3
6	Bungku Timur	1	2	1	4	1
7	Bungku Barat	1	3	1	5	3
8	Bumi Raya	1	3	1	5	3
9	Wita Ponda	1	2	1	4	1
10	MOROWALI	1	2	1	4	1

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Ket : Aman
 Rawan
 Waspada

2.1.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.42.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Indikator	Tahun		
	2010-2019	2010-2020	2010-2021
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.92	0.953	

Sumber data: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

2.1.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.43.
Capaian Indikator Bidang Kinerja Bidang Perhubungan

Indikator	CAPAIAN		
	2019	2020	2021
Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)	17.000	17.000	18.24.180
Jumlah kapal berangkat	300	300	304
Jumlah penumpang turun	9.000	5.000	13.080
Jumlah Penumpang naik	8.000	6.000	11.100
Jumlah barang bongkar (ton)	200.000	15.000	10.640
Jumlah barang muat (ton)	400.000	35.000	9.120
Rasio Ijin Trayek	17	17	10
Jumlah uji kir angkutan umum	-	150	-
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	1	3
Persentase layanan angkutan darat	33.5	35	30
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	150	-
Pemasangan rambu-rambu	350	-	45
Rasio panjang jalan per jumlah kendarann	4.97	4,7	1;15
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6.521	6.000	105.120
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	17.000	17.000	181.566

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali tahun 2022

2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

A. Data Tower

Tabel 2.44.
Data Tower Kabupaten Morowali

NO	SITEID	SITE NAME	KOTA_KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS JARINGAN		
						2G	3G	4G
1	COI097	COMBAT MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	-	Ya
2	LWK038	IPI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	IPI	Ya	Ya	Ya
3	MRW002	BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	Ya	Ya	Ya
4	MRW003	BAHONSUAI	MOROWALI	BUMI RAYA	PARILANGKE	Ya	Ya	Ya
5	MRW006	LAANTULA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	LANTULA JAYA	Ya	Ya	Ya
6	MRW008	WOSU	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	Ya	Ya	Ya
7	MRW016	BAHODOPI	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
8	MRW017	BUMI RAYA	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBATAE	Ya	Ya	Ya
9	MRW019	UNGKAYA	MOROWALI	WITA PONDA	UNGKAYA	Ya	Ya	Ya
10	MRW022	KANTOR BUPATI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
11	MRW023	LIMBO MAKMUR	MOROWALI	BUMI RAYA	LIMBO MAKMUR	Ya	Ya	Ya
12	MRW024	BENTE	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
13	MRW025	KEPULAUAN MENUI	MOROWALI	MENUI KEPULAUAN	ULUNAMBO	Ya	-	-
14	MRW028	DMT ATANANGA	MOROWALI	BUMI RAYA	SAMARENDA	Ya	-	Ya
15	MRW033	TBG LANONA	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	LANONA	Ya	Ya	Ya
16	MRW034	TBG MATANSALAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MATANSALA	Ya	Ya	Ya
17	MRW035	TBG TOPUTI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	TOFUTI	Ya	Ya	Ya
18	MRW044	DMT BAHOMOLEO	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOLEO	Ya	Ya	Ya
19	MRW120	TBG BUNGKU TIMUR	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	KAPALA	Ya	-	
20	MRW045	DMT BAHOMETEFE	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMETEFE	Ya	Ya	Ya
21	MRW046	DMT FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
22	MRW117	TBG FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
23	MRW051	TBG BAHOMAKMUR	MOROWALI	BAHODOPI	BAHOMAKMUR	Ya	Ya	Ya
24	MRW052	TBG LEULEA	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	
25	MRW058	TBG SALONSA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	SOLONSA JAYA	Ya	-	
26	MRW059	TBG TOFOGARO	MOROWALI	BUNGKU BARAT	TOFOGARO	Ya	Ya	Ya
27	MRW060	TBG KALEROANG	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	KALEROANG	Ya	-	
28	MRW072	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
29	MRW076	BDM MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
30	MRW077	TBG ARTHABUMI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	LAROENAI	Ya	Ya	Ya
31	MRW078	BDM MOROWALI 2	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
32	MRW083	API BUNGKU TENGAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
33	MRW084	BDM BROLY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
34	MRW086	MCR PASAR BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BUNGI	Ya	Ya	Ya
35	MRW087	DMT UMBELE	MOROWALI	BUMI RAYA	UMBELE	Ya	Ya	Ya
36	MRW088	DMT BAHOMOHONI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
37	MRW089	WANXIANG	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMETEFE	Ya	Ya	Ya
38	MRW092	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
39	MRW093	IMIP RUSUNAWA APARTEMEN	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
40	MRW098	BDM MESS LIME STONE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
41	MRW099	BDM MESS BLOK M	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
42	MRW114	EBT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
43	MRW100	BO DMT ISAT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
44	MRW106	IMIP BDM MESS 2 A	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
45	MRW107	IMIP GUEST HOUSE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
46	MRW130	BDM WORKSHOP KM6	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya

47	MRW131	BDM OFFICE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
48	MRW094	DMT BETE-BETE	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	BETE-BETE	Ya	-	
49	MRW095	DMT TANGOFA	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	TANGOFA	Ya	-	

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020 (Di Olah)

B. Jaringan Telekomunikasi Untuk Kabupaten Morowali

2.45

Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali

No	Lokasi	Status Sinyal Komunikasi				Ket.
		4G	3G	2G	No Signal	
1	Kec. Bungku Tengah	1	15	1	2	
2	Kec. Bungku Timur	0	5	0	5	
3	Kec. Bahodopi	0	7	2	2	
4	Kec. Bungku Pesisir	1	4	2	2	
5	Kec. Bungku Selatan	0	2	4	20	
6	Kec. Menui Kepulauan	0	3	3	18	Signal untuk desa Dongkalan berasal dari desa Molore, Provinsi SulTra
7	Kec. Bungku Barat	0	10	0	0	
8	Kec. Bumi Raya	0	13	0	0	
9	Kec. Witaponda	0	9	0	0	

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020 (Di Olah)

2.1.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan perhatian dalam pembangunan Morowali mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Morowali. Sedangkan Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari usaha persaingan yang tidak sehat. Secara umum ada tiga aspek untuk melihat UMKM yaitu dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Adapun kondisi koperasi dan UKM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.46.

Data Jumlah Koperasi Aktif (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif	30	52	52
Jumlah Seluruh Koperasi	129	142	148
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)	87	95	95

Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM Aktif)	41	33	45
Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil)	4.360	4.589	5.202

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2021

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan protein hewani dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel 2.47
Produksi Kebutuhan Protein Hewani Kabupaten Morowali,
Tahun (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Produksi perikanan tangkap (ton)	3,4126.6	28.457,4	33.309,3
Produksi perikanan budi daya	65.91	173	197,8
Produksi rumput laut	545.58	23.138	5.962

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Tahun 2021

2.1.3.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan jika terdapat potensi objek pariwisata dan cara untuk mempromosikan objek wisata tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dapat dilihat dari dua indikator sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Objek Wisata

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan wisatawan	5.190	5.495	7.223
Objek wisata	31	31	31

Sumber data: Dinas Dispora Kabupaten Morowali Tahun 2021

Program pengembangan destinasi pariwisata merupakan upaya menata kawasan/obyek wisata, serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (tourist arrival). Program

Pengembangan pemasaran pariwisata dimaksudkan untuk lebih mengenalkan, memberikan informasi dan promosi pariwisata di Morowali kepada pasar wisata potensial baik regional maupun nasional bahkan internasional. Saat ini pemerintah Kabupaten Morowali dalam upaya pengembangan pariwisata dalam bidang infrastruktur sehingga dengan infrastruktur pariwisata yang memadai maka akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Morowali yang secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap perekonomian daerah.

2.1.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Morowali. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaissans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Dua indikator untuk melihat capaian kinerja pada urusan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (TON) Kabupaten Morowali
Tahun (2018 – 2021)

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2018					2019				
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
PADI SAWAH+	12,146.50	10,695.50	2.00	4.873	52,119.17	9,880.30	11,264.30	252.50	4.873	54,890.93
PADI LADANG										
PADI SAWAH	11,891.50	10,458.50	2.00	4.89	51,131.61	9,743.30	11,129.30	250.50	4.89	54,411.15
PADI LADANG	255.00	237.00	-	2.44	578.99	137.00	135.00	2.00	2.44	329.81
JAGUNG	628.00	1,530.4	4.00	3.695	5,654.83	1,347.30	1,179.7	3.00	3.695	4,358.99
KEDELAI	1,978.20	1,543.70	514.50	1.326	2,046.95	56.00	61.00	1.00	1.33	80.89
KACANG TANAH	54.00	51.50	1.00	1.259	64.84	49.50	52.50	1.00	1.26	66.10
UBI KAYU	127.00	160.00	6.00	26.669	4,267.04	133.00	144.00	-	26.669	3,840.34
UBI JALAR	40.50	46.50	1.00	13.027	605.76	41.00	38.50	-	13.027	501.54
KACANG HIJAU	136.80	137.80	-	0.802	110.52	58.00	61.00	-	0.802	48.92
TALAS	22.00	35.00	-	-	-	17.50	19.50	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.49

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2020					2021				
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Puso	Produktivitas	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Puso	Produktivitas	Produksi
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)
PADI SAWAH + PADI LADANG	10.443,30	9.852,00	45,00	4,559	44.915,27	8.974,20	9.433,00	21,00	4,900	46.221,70
PADI SAWAH	10.362,30	9.766,00	45,50	4,560	44.532,96	8.895,20	9.343,00	21,00	4,950	46.247,85
PADI LADANG	81,00	86,00		3,720	319,92	79,00	90,00	-	3,500	315,00
JAGUNG	2.405,20	1.814,40	48,00	4,415	80.190,58	945,30	1.040,10	2,00	4,200	4.368,42
KEDELAI	426,00	229,00	8,00	1,327	303,88	63,50	190,00	4,00	1,000	190,00
KACANG TANAH	59,00	53,00	1,00	1,122	59,47	60,90	69,90	-	1,122	78,43
UBI KAYU	182,00	173,00	4,50	27,883	4.823,76	228,00	224,50	-	27,883	6.259,73
UBI JALAR	75,90	68,90		15,842	1.091,51	81,00	87,00	-	15,842	1.378,25
KACANG HIJAU	73,90	73,40	3,00	0,790	57,99	53,50	57,50	-	0,790	45,43
TALAS						44,50	55,00	-	0,790	43,45

Sumber : Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Morowali Tahun 2022

2.1.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,9	-4,98	1,24
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	2.08		

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2020

Sektor perdagangan memberikan andil yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

2.1.3.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri pada PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51.

Indikator Capaian Kinerja Bidang Perindustrian

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (HK 2000)	19,77	34,40	81,03
Pertumbuhan Industri (HK 2000)	652	769	0-2
Pertumbuhan IKM	-18	98	NA

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020(Di Olah)

Terjadi penurunan PDRB di sektor perindustrian sebesar 2,05 persen. Meskipun terjadi penurunan, tetapi sektor industri masih menjadi sektor yang paling tinggi dalam berkontribusi pada PDRB hal ini dikarenakan adanya aktifitas pertambangan sebagai kategori dari industri pengolahan besar. Peningkatan ini kemudian yang tidak diikuti oleh industri kecil atau industri rumah tangga sehingga terjadi ketimpangan antara level industri sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengkoneksikan industri kecil dengan kawasan perindustrian. Terjadinya koneksi antara industri kecil dengan kawasan perindustrian diharapkan dapat menunjang PDRB sektor industri dan mengurangi gap antara industri besar dan kecil.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebelum pergeseran sebesar **Rp. 1.466.842.480.886,00,-** realisasi sampai dengan Triwulan ke-II sebesar **Rp. 297.268.696.933,17,-** atau sebesar **20,27%..** Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2022 selengkapnya dapat dilihat pada table :

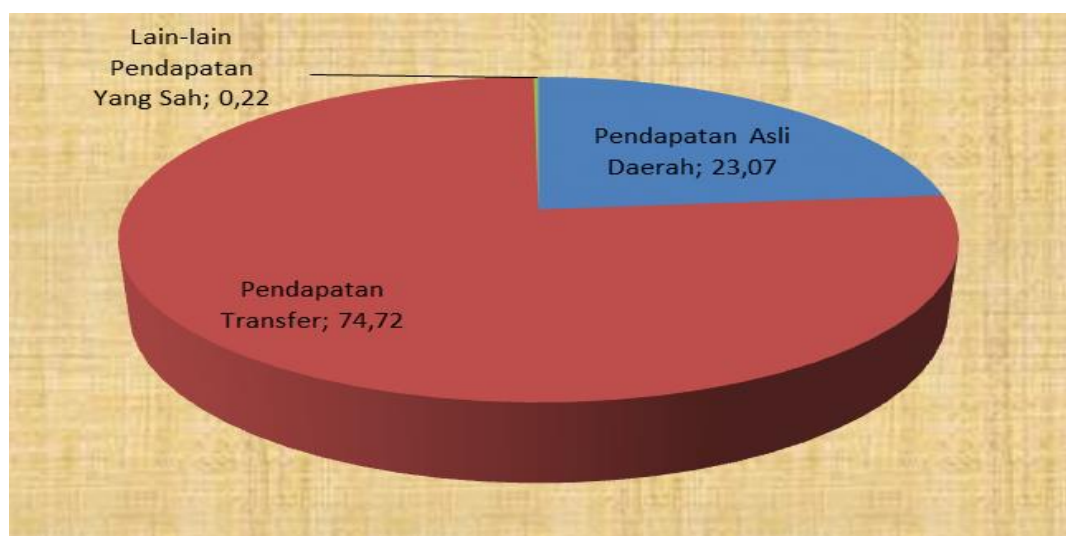
Tabel 2.52
Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Morowali
Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Anggaran 2022	
		Sebelum Pergeseran	Realisasi
1	2	3	4
1	Pendapatan Daerah	1.466.842.480.886,00	297.268.696.933,17
	- Pendapatan Asli Daerah	394.951.348.983,00	106.581.496.063,17
	- Pendapatan Transfer	107.1891.131.903,00	190.687.200.870,00
2	Belanja Daerah	1.475.300.370.937,00	247.200.640.313,16,
	- Belanja Operasi	995.125.193.549,00	216.940.842.668,35
	- Belanja Modal	267.196.702.301,00	14.872.361.250,81
	- Belanja Tidak Terduga	8.766.707.367,00	649.790.269,00
	- Belanja Transfer	204.211.767.720,00	14.737.646.125,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Persentase Pendapatan dan Belanja terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

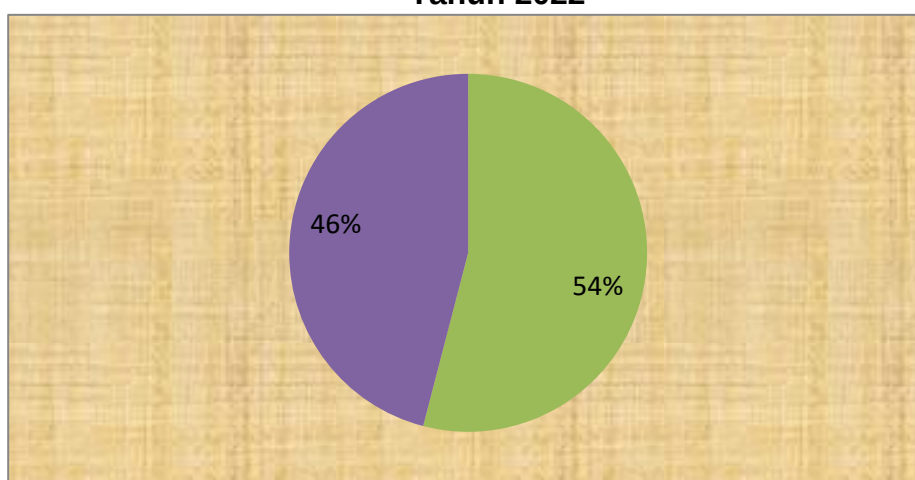
Gambar 2.13
Persentase Pendapatan APBD Kabupaten Morowali
Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Untuk komposisi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2022, belanja operasi masih lebih tinggi dengan persentase 62%. Belanja ini focus untuk membiayai gaji pegawai, gaji honor guru kontrak tenaga kesehatan, honor petugas kebersihan dan petugas rumah ibadah, belanja modal sebesar 19% dengan focus belanja pada infrastruktur dasar khususnya daerah kepulauan dan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Belanja tak terduga sebesar 3% focus pada penanganan bencana seperti percepatan penanganan covid-19. Persentase belanja dapat digambarkan pada table sebagai berikut

Gambar : 2.14
Persentase Belanja APBD Kabupaten Morowali
Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Realisasi belanja daerah sampai pada triwulan ke II tahun 2022 anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten morowali masih dikategorikan **rendah** baru mencapai **24,60%**. capaian realisasi anggaran daerah dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.53
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Morowali
s/d Triwulan II Tahun 2022

Perangkat Daerah	Pagu Setelah Pergeseran	Realisasi s/d TW II	Capaian
1	2	3	4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	279.048.982.204	62.419.918.574	22,37
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98.008.530.876	18.894.940.406	19,28
Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	96.117.389.247	12.714.501.965	13,23
Rumah Sakit Pratama	12.343.670.965	2.686.946.063	21,77
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.533.762.659	3.958.250.323	2,28
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69.009.423.692	9.563.081.763	13,86
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.144.362.464	1.966.377.152	24,14
Satuan Polisi Pamong Praja	14.545.330.789	5.572.759.212	38,31
Dinas Sosial	12.922.578.008	3.670.271.295	28,40
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah	7.489.271.083	1.439.057.583	19,21
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	14.295.541.507	4.176.679.547	29,22
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	5.315.211.394	1.770.547.869	33,31
Dinas Perhubungan Daerah	13.969.390.520	1.797.183.941	12,87
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.243.201.211	2.694.869.992	37,21
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.908.623.558	1.406.840.142,00	8,84
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.667.818.668	5.146.549.484	24,90
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.268.570.633	3.786.691.683	24,80
Dinas Perpustakaan Daerah	4.785.932.662	1.503.249.917	31,41
Dinas Perikanan Daerah	35.128.711.652	2.753.226.640,00	7,84
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	83.180.804.154	9.134.314.842	10,98

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.117.349.338	1.232.513.669	17,32
Sekretariat Daerah	79.959.361.375	29.286.229.493	36,63
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32.720.195.184	11.399.404.851	34,84
Inspektorat Daerah	15.121.156.087	3.659.588.182	24,20
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.345.661.019	2.629.375.595	19,70
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	246.554.783.356	22.277.961.518	9,04
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	21.671.275.419	2.682.546.130	12,38
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.596.588.475	1.839.343.092	21,40
Kecamatan Bahodopi	5.656.182.911	1.633.379.039	28,88
Kecamatan Bumi Raya	3.614.477.518	1.465.374.079	40,54
Kecamatan Bungku Barat	5.809.882.536	1.403.570.012	24,16
Kecamatan Bungku Pesisir	4.293.190.884	1.317.620.797	30,69
Kecamatan Bungku Selatan	4.227.007.237	1.563.773.798	36,99
Kecamatan Bungku Tengah	14.877.180.653	5.915.533.401	39,76
Kecamatan Bungku Timur	2.577.305.354	912.025.300	35,39
Kecamatan Menui Kepulauan	7.893.216.751	2.880.978.399	36,50
Kecamatan Wita Ponda	6.223.916.389	1.236.622.660	19,87
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	6.223.916.389	2.119.806.639	34,06
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.970.443.300	2.937.669.544	32,75
	1.482.380.198.121	255.449.574.590	24,60

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

3.1 Evaluasi Capaian Keuangan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Secara umum hasil evaluasi program kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali sampai triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1, Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Pendidikan merupakan misi 3 dari RPJMD 2018-2023 yaitu, *Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama*

kinerja bidang pendidikan berdasarkan target RPJMD semakin meningkat, beberapa indikator pendidikan mengalami peningkatan kinerja seperti indeks pembangunan manusia berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 74,00 % realisasi mencapai 72,29%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

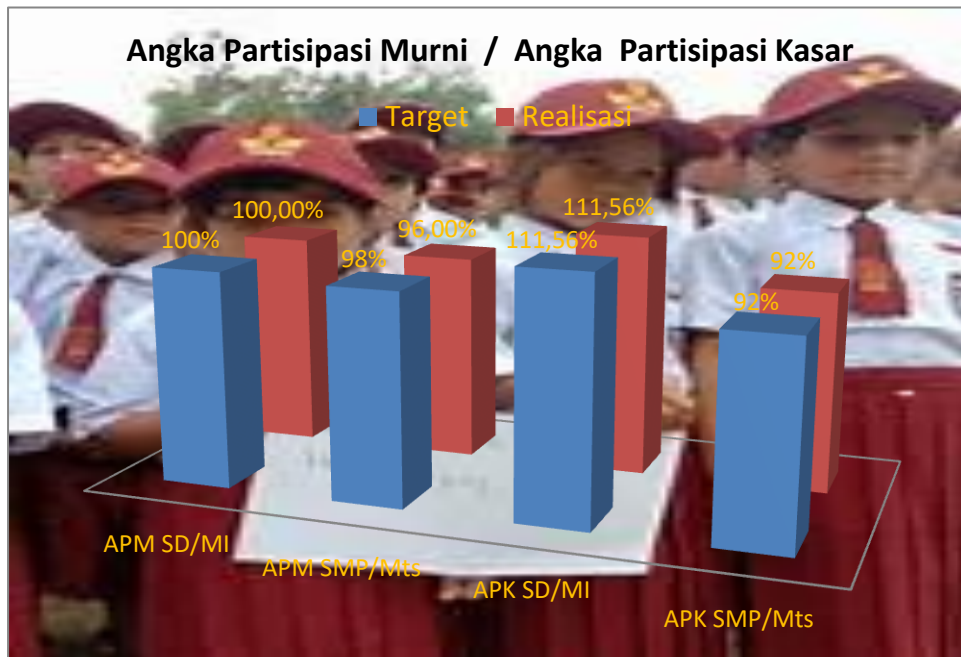
Gambar : 2.15
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja bidang pendidikan semakin baik yaitu Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A target RPJMD tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi mencapai 94,72%, SMP/Mts/Paket B target 2022 76% capaian tahun 2020 73,49% dan Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A target tahun 2022 sebesar 111,56% capaian tahun 2020 108,93%, SMP/Mts/Paket B target tahun 2022 sebesar 100% capaian tahun 2020 sebesar 81,03%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.16
Capaian Indikator Pendidikan APK/APM
Berdasarkan Target RPJMD



Untuk Indikator Harapan Lama Sekolah target RPJMD tahun 2022 sebesar 14,00% dan realisasi mencapai 13,35%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 2.17
Capaian Indikator Pendidikan Harapan Lama Sekolah
Berdasarkan Target RPJMD



Untuk Indikator Rata-rata Lama Sekolah target RPJMD tahun 2022 sebesar 9,70% dan realisasi mencapai 9,35%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.18
Capaian Indikator Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah
Berdasarkan Target RPJMD



Untuk capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 32,88% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi kinerja pembangunan sebesar 74,48% dengan kategori **Sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.54
Capaian Realisasi Anggaran
Program Pendidikan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TW II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	259.772.256.327	85.402.327.267	32,88	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	109.894.476.607	11.642.371.470	10,59	RENDAH

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	300.534.870	3.180.000	1,06	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.313.560.240	15.840.000	0,68	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.225.680.935	73.474.966.667	50,25	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.038.003.675	265.969.130	25,62	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Utama Pendidikan
Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Pendidikan				74,48	Rendah
Angka Partisipasi Murni		–	–	–	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	%	97,5	96	98,5	Tinggi
Angka partisipasi kasar					
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	111,56	111,56	100,0	Sangat Tinggi
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B	%	92,09	92,09	100	Tinggi
Angka Putus Sekolah:					
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0,01	0,01	Sangat Rendah
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts	%	0	0,44	0,44	Sangat Rendah
Angka Kelulusan:					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	0	0	Sangat Rendah
Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	%	100	0	0	Sangat Rendah
Angka Melanjutkan (AM):					
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	%	98,31	97,89	99,57	Sangat Rendah
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	%	100	100	100	Sangat Rendah
Fasilitas Pendidikan					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	148	148	100	Sangat Tinggi

Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MK kondisi bangunan baik	Unit	47	47	100	Sangat Tinggi
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	0,120139	0,120139	100	Sangat Tinggi
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SLP	%	0,159722	0,159722	100	Sangat Tinggi
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	01:24	01:24	100	Sangat Tinggi
Rasio guru terhadap murid pendidikan SLP	%	01:20	01:20	100	Sangat Tinggi
Kebudayaan					
Penyelenggara festival seni dan budaya	Kegiatan	3	2	66,67	Sangat Rendah
Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	100	Sangat Tinggi
Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	Sarana	2	1	50	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Kesehatan merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama*; dengan adanya misi ini diyakini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini dapat di kinerja indikator kesehatan semakin baik , beberapa indikator Kesehatan mengalami peningkatan kinerja seperti usia harapan hidup berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 69,33 tahun realisasi ditahun 2020 mencapai 69,23 tahun, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 2.19
Capaian Realisasi Usia Harapan Hidup
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja bidang kesehatan semakin baik yaitu Angka kematian bayi target RPJMD tahun 2022 sebesar 0,87% dan realisasi tahun 2020 mencapai 0,13%, angka kelangsungan hidup bayi target 2022 0,28% capaian tahun 2020 0,35% dan angka kematian balita target tahun 2022 sebesar 10,42 capaian tahun 2020 0,51%, angka kematian neonatal per 100 kelahiran Hidup target tahun 2022 sebesar 10,66% capaian tahun 2020 sebesar 11,96%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.20
Capaian Realisasi Angka kematian bayi,
angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita dan angka kematian
neonatal per 100 kelahiran Hidup Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja bidang kesehatan yaitu realisasi Angka Stunting tahun 2022 sebesar 5,20% dari target RPJMD sebesar 6,60% capaian kinerja ini sudah semakin meningkat mengingat angka stunting semakin menurun dari tahun 2019 sebesar 12% dan ditahun 2020 sebesar 7,8%, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.21
Capaian Realisasi Angka Stunting
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Untuk capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 21,86% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utam sebesar 102,60% dengan kategori **Sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.56
Capaian Realisasi Anggaran Program
Kesehatan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	125.497.142.571	27.438.248.612	21,86	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.203.052.132	21.453.938.779	44,51	Rendah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.117.890.519	8.499.467.800	13,91	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.067.734.000	3.615.780.000	35,91	Rendah
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	672.019.420	460.000.000,00	68,45	Sedang

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	661.973.930	271.000.000	40,94	Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	491.714.635	140.000.000	28,47	Rendah
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.139.555.935	3.860.000.000	93,25	Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	143.202.000	81.700.000	57,05	Sedang

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang Kesehatan Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Kesehatan				102,60	Sangat Tinggi
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	0,87	0,87	100,00	Sangat Rendah
Angka kelangsungan hidup bayi	%	0,28	0,28	100,00	Sangat Tinggi
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	0,31	0,42	135,48	Sangat Tinggi
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	9,5	11,96	125,89	Sangat Tinggi
Rasio posyandu per satuan balita	%	15,79	15,79	100,00	Sangat Tinggi
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi
Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	%	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	%	0,31	0,31	100,00	Sangat Tinggi
Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000 pddk)	%	6,07	6,13	100,99	Sangat Tinggi
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	17,18	19,09	111,12	Sangat Tinggi
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	72,73	58,18	79,99	Tinggi
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98,48	97,48	98,98	Sangat Tinggi

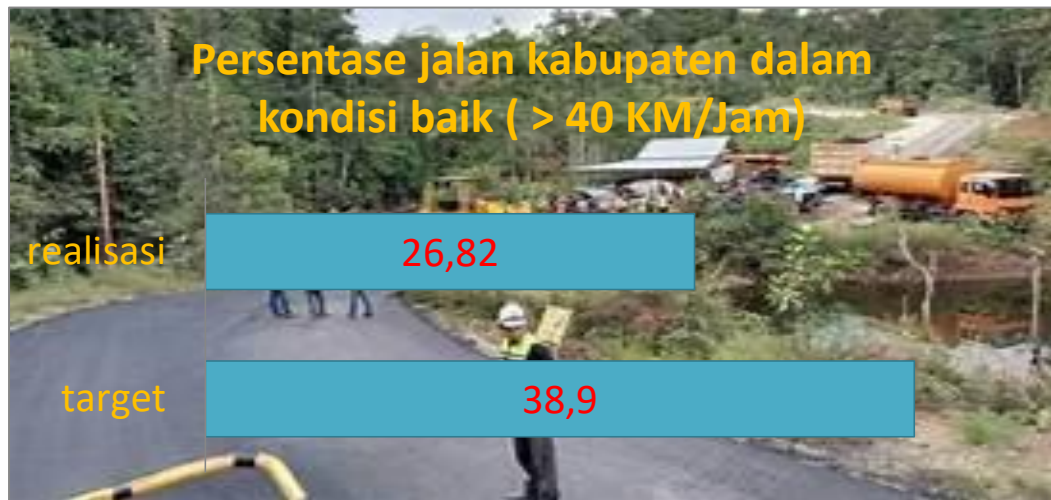
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	%	6	7	116,67	Sangat Tinggi
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Penderita diare yang ditangani	Orang	1657	1841	111,10	Sangat Tinggi
Angka kejadian Malaria	%	50	55	110,00	Sangat Tinggi
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan kunjungan bayi	%	20	18	90,00	Sangat Tinggi
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan pembantu puskesmas	%	25,56	25,56	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (rasio kunjungan K4)	%	89,86	85,59	95,25	Sangat Tinggi
Cakupan pelayanan anak balita	%	96,06	87,33	90,91	Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,9	1,9	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur daerah, sehingga mengurangi kesenjangan wilayah dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia*. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan mengalami peningkatan kinerja antara lain persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 38,9% realisasi ditahun 2022 mencapai 26,82%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.22
Capaian Realisasi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Berdasarkan RPJM



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator lainnya Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan mengalami peningkatan kinerja antara lain Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 40% realisasi mencapai 36,07%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.23
Capaian Realisasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Berdasarkan RPJM



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator lainnya Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan mengalami peningkatan kinerja antara lain rasio jaringan irigasi, berdasarkan target

kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 16,97% realisasi mencapai 17,04%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

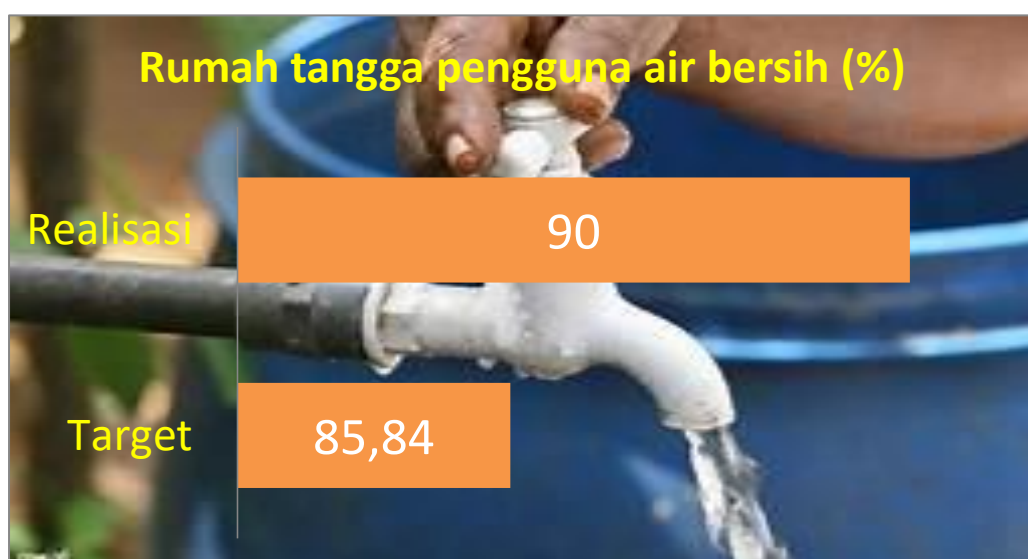
Gambar : 2.24
Capaian Realisasi Rasio Jaringan Irigasi
Berdasarkan RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator lainnya Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan mengalami peningkatan kinerja antara lain Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 85,84% realisasi mencapai 90%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.25
Capaian Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Berdasarkan RPJM



sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 18,24% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 94,10% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58
Capaian Realisasi Anggaran
Program PU dan Penataan Ruang Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.781.913.127	26.404.451.352	18,24	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.746.400.739	4.394.140.932	45,08	Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.396.496.065	2.363.546.590	12,85	Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.026.181.063	145.265.700	1,61	Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.724.152.676	99.437.700	0,85	Rendah
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.919.602.294	153.030.000	0,96	Rendah
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	78.356.068.330	19.134.414.980	24,42	Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	210.552.860	72.733.000	34,54	Rendah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.402.459.100	41.882.450	2,99	Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Utama PU dan
Penataan Ruang Tahun 2022

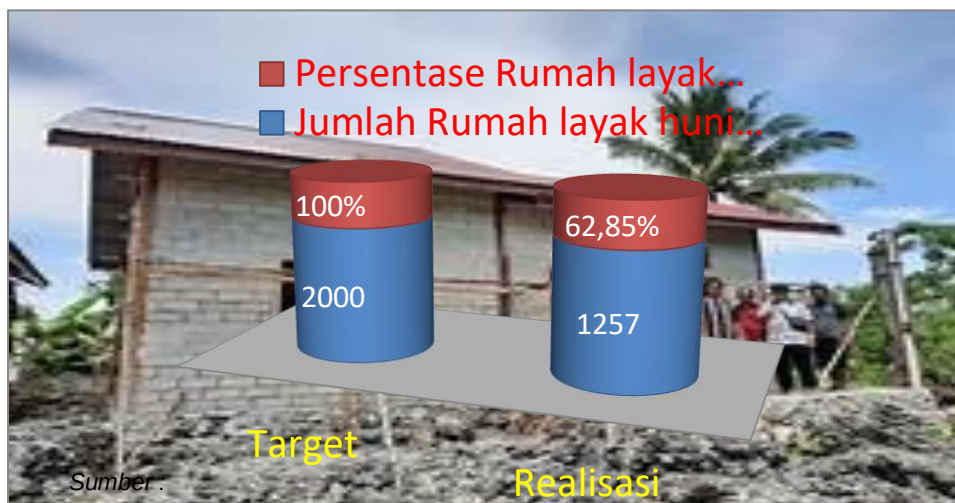
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				94,1	
Pekerjaan Umum					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	40	36,07	90,18	Tinggi
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	38,9	26,82	68,95	Tinggi
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,25	75,69	99,27	Sangat Tinggi
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	%	85,84	90	104,85	Sangat Tinggi
Rasio Jaringan Irigasi	%	16,97	17,04	100,41	Sedang
Persentase penduduk berakses air minum	%	67,9	53,7	79,09	Sedang
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	0,0097	0,0078	80,41	Sangat Tinggi
Penataan Ruang					
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	31,5	31,5	100,00	Sangat Tinggi
Rumah tangga pengguna air bersih (%)		94	93	98,94	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur daerah, sehingga mengurangi kesenjangan wilayah dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia*. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dikategorikan rendah, seperti indikator Jumlah rumah layak huni terbangun, berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 2.000 unit rumah realisasi ditahun 2022 baru mencapai 1.257 unit rumah atau baru kisaran baru terealisasi 62,85%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar : 2.26
Capaian Realisasi Rumah Layak Huni
Berdasarkan RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan juga yang belum memenuhi target yaitu indikator jumlah rumah tangga miskin pengguna listrik target RPJMD tahun 2022 sebesar 700 rumah tangga baru terealisasi 70 rumah tangga atau 10 %, seperti dapat disajikan pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.27
Capaian Realisasi
Rumah Tangga Miskin Pengguna Listrik
Berdasarkan RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 18,04% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 5% dengan kategori **sangat rendah**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.60
Capaian Realisasi Anggaran Program
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	69.009.423.852	12.449.066.054	18,04	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.325.459.217	2.369.239.854	44,49	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.576.982.900	1.221.003.000	77,43	SEDANG

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	28.278.677.000	1.241.365.000	4,39	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	24.763.340.735	6.785.995.650	27,40	RENDAH
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.064.964.000	831.462.550	9,17	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Utama
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Keterangan
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				5	Sangat Renda
Jumlah Rumah layak huni terbangun	unit	450	0	0	Sangat Renda
Jumlah rumah tangga miskin pengguna listrik	unit	700	70	10	Sangat Renda

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA, pengembangan UMKM, IKM Koperasi dan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan bersama*; indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan dikategorikan tinggi, seperti indikator angka partisipasi angkatan kerja, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 53,58 realisasi mencapai 65,55, seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

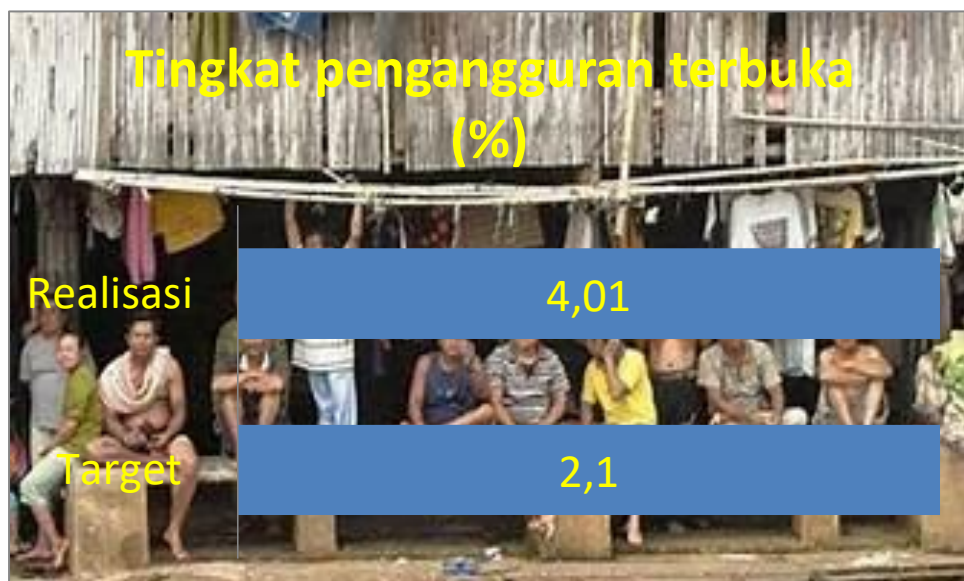
Gambar : 2.28
Capaian Realisasi Indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Berdasarkan RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 2,01 realisasi mencapai 4,01, seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.29
Capaian Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Tebuka (%)
Berdasarkan RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 34,25% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 97,7% dengan kategori *tinggi*. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.62
Capaian Realisasi Anggaran Program
Ketenaga Kerjaan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	4.311.197.440	1.476.405.204	34,25	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.714.834.000	1.016.822.013,00	59,30	RENDAH
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.274.777.800	243.699.720	19,12	RENDAH
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	680.044.490	120.074.251	17,66	RENDAH
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	546.414.800	51.113.100	9,35	RENDAH
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	48.150.200	28.212.910	58,59	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	46.976.150	16.483.210	35,09	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.63
Capaian Indikator Ketenaga Kerjaan
Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capain	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Tenaga Kerja				97,7	Sedang
Angka partisipasi angkatan kerja	%	54,404	65,55	120,49	Sangat Tinggi

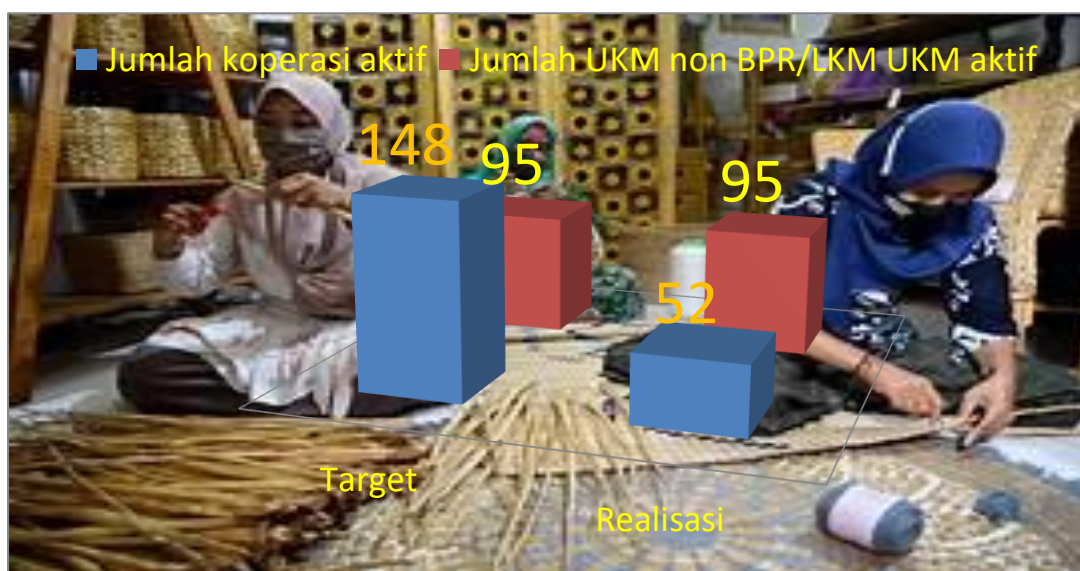
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	58,5	65,55	112,05	Sangat Tinggi
Tingkat pengangguran terbuka	%	2,1	4,01	52,37	Rendah
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	26	27	96,30	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

2. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA, pengembangan UMKM, IKM Koperasi dan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan bersama*. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikategorikan tinggi, seperti indikator jumlah koperasi aktif, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 148 capaian 52 koperasi, Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM aktif target tahun 2022 sebesar 95 UMKM realisasi sebesar 95 UMKM atau 100% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.30
Capaian Realisasi Jumlah Koperasi Aktif dan
Jumlah UMKM non BPR/LKM Aktif
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 13,59% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 99,82%

dengan kategori **sangat Sangat Tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64
Capaian Realisasi Anggaran Program
Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	11.286.862.416	1.534.427.413	13,59	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.460.224.276	1.386.286.863	40,06	RENDAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.814.800	19.504.400	98,43	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	73.514.950	70.725.950	96,21	SANGAT TINGGI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.216.982.800	27.079.200	0,52	SANGAT RENDAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	653.893.650	30.831.000	4,71	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.862.431.940		-	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Utama
Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				99,82	Sangat Tinggi
Persentase koperasi aktif	%	100	50	50,00	Sangat Tinggi

Jumlah koperasi aktif	Unit	148	52	35,14	Tinggi
Jumlah seluruh koperasi	Unit	148	148	100,00	Sangat Tinggi
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi
Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM)	%	15	15	100,00	Sangat Tinggi
Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil)	%	690	690	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 32,43% dengan kategori **rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 98,4% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.66
Capaian Realisasi Keuangan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	5.460.064.244	1.770.547.869	32,43	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.951.944.993	1.685.251.589	42,64	RENDAH
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	559.565.770	41.070.000	7,34	RENDAH
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	191.200.280	2.068.270	1,08	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	696.448.546	42.158.010	6,05	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	60.904.655,00	-	-	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				98,4	Tinggi
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	32	31	96,88	Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 32,68% dengan kategori **rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.68
Capaian Realisasi Keuangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.025.097.644	2.622.670.055	32,68	RENDAH
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.804.320	20.795.350	34,20	RENDAH
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	78.324.745	47.532.995	60,69	SEDANG

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.060.644.440	129.385.000,00	12,20	RENDAH
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	256.560.290	28.171.400,00	10,98	RENDAH
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	88.510.020	3.300.950	3,73	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.443.582.064	2.313.489.660	42,50	RENDAH
PROGRAM PENATAAN DESA	42.168.750	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	35.918.000	3.180.000	8,85	RENDAH
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	725.818.215	63.214.700	8,71	RENDAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	232.766.800	13.600.000	5,84	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100	Sangat Tinggi
Persentase kantor desa dalam kondisi baik	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	143	143	100	Sangat Tinggi
PKK aktif	PKK	143	143	100	Sangat Tinggi
Posyandu aktif	Posyandu	154	154	100	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

5. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 40,49% dengan kategori Rendah dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 97,64% dengan kategori **tinggi**.

Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.70
Capaian Realisasi Keuangan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.271.727.877	2.539.564.948	40,49	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.948.046.977	2.293.406.798	46,35	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	46.414.000	8.583.250,00	18,49	RENDAH
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	422.476.000	6.360.000	1,51	SANGAT RENDA
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	428.854.650	58.399.750	13,62	RENDAH
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	367.015.800	161.848.100	44,10	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	58.920.450	10.967.050	18,61	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Utama
Penanaman Modal Tahun 2022

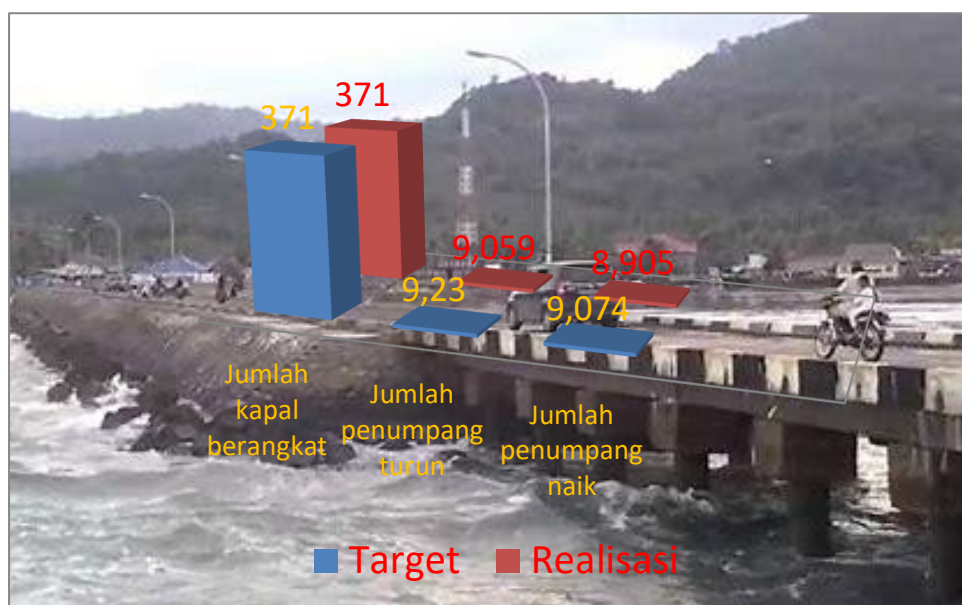
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Penanaman Modal				97,64	Sangat Tinggi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	115	114	99,13	Sangat Tinggi
Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (juta)	Rp	63.526.418	58.526.418	92,13	Sangat Tinggi
Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dn PMDN)	%	3,166	3,166	100,00	Sangat Tinggi
Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta)	Rp	8.057.693	8.057.693	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur daerah, sehingga mengurangi kesenjangan wilayah dan terciptanya kehipan masyarakat yang harmonis dan bahagia*. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dikategorikan tinggi, seperti indikator Jumlah Kapal Berangkat, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 371 realisasi ditahun mencapai 371 seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.31
Capaian Realisasi Jumlah Kapal Berangkat,
Jumlah Barang Turun, Jumlah Penumpang Naik
dan Jumlah Penumpang Turun
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator Jumlah Pelabuhan laut, udara dan terminal bus, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 3 realisasi ditahun mencapai 3 seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.31
Capaian Realisasi Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus
Berdasarkan Target RPJMD



indikator Pemasangan Rambu-Rambu, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 310 realisasi ditahun mencapai 310 atau 100% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.33
Capaian Realisasi Pemasangan Rambu-Rambu
Berdasarkan Target RPJMD



Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 8,06% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 88,84% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.72
Capaian Realisasi Anggaran Program Perhubungan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Perhubungan Daerah	13.969.390.520	1.125.573.878	8,06	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.215.046.813	1.095.821.578	21,01	SEDANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.267.943.950	6.742.300	0,53	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.486.399.757	23.010.000	0,31	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Utama Perhubungan Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Perhubungan				88,84	Sedang
Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)					
Jumlah kapal berangkat	unit	371	371	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah penumpang turun	orang	9,23	9,059	98,15	Sangat Tinggi

Jumlah penumpang naik	orang	9,074	8,905	98,14	Sangat Tinggi
Jumlah barang bongkar (ton)	Ton	212,35	208,411	98,15	Sangat Tinggi
Jumlah barang muat (ton)	Ton	473,593	464,808	98,15	Sangat Tinggi
Rasio Ijin Trayek	%	24	23	95,83	Sangat Tinggi
Jumlah uji kir angkutan umum	angkutan	650	650	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	pelabuhan	3	3	100,00	Sangat Tinggi
Pemasangan rambu-rambu	rambu	310	310	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

7. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 29,14% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.74
Capaian Realisasi Anggaran Program
Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.270.180.281	1.827.100.910	29,14	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.503.162.827	1.368.464.960	39,06	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	346.380.650	57.938.000	16,73	RENDAH
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.420.636.804	400.697.950	16,55	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Utama
Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Komunikasi dan Informatika				100	Sangat Tinggi
Jumlah penyiaran radio/TV Lokal	Siaran	1	1	1	Sangat Tinggi
Web Side milik Pemerintah Daerah	Web	1	1	1	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA, pengembangan UMKM, IKM Koperasi dan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan bersama*. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dikategorikan tinggi, indikator Nilai Tukar Nelayan, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 103% realisasi mencapai 105% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

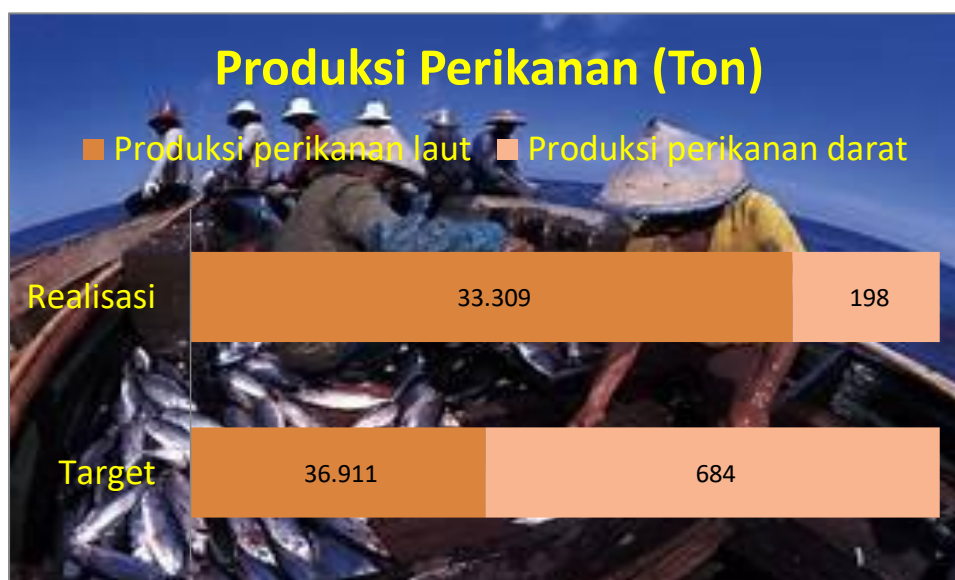
Gambar : 2.34
Capaian Realisasi Nilai Tukar Nelayan
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator Produksi Perikanan, produksi perikanan laut berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 36.911 ton realisasi mencapai 33,309 sedangkan untuk produksi perikanan darat target sebesar 684 realisasi sebesar 198, seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.35
Capaian Produksi Perikanan
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 7,90% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 85,36% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.76
Capaian Realisasi Anggaran Program
Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Perikanan Daerah	34.752.807.876	2.745.102.605	7,90	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.407.710.280	2.181.712.405	40,34	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	21.751.844.565	421.775.200	1,94	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.084.826.271	78.310.000	2,54	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.660.000	9.000.000	16,77	RENDAH
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.454.766.760	54.305.000	1,22	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel : 2.78
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

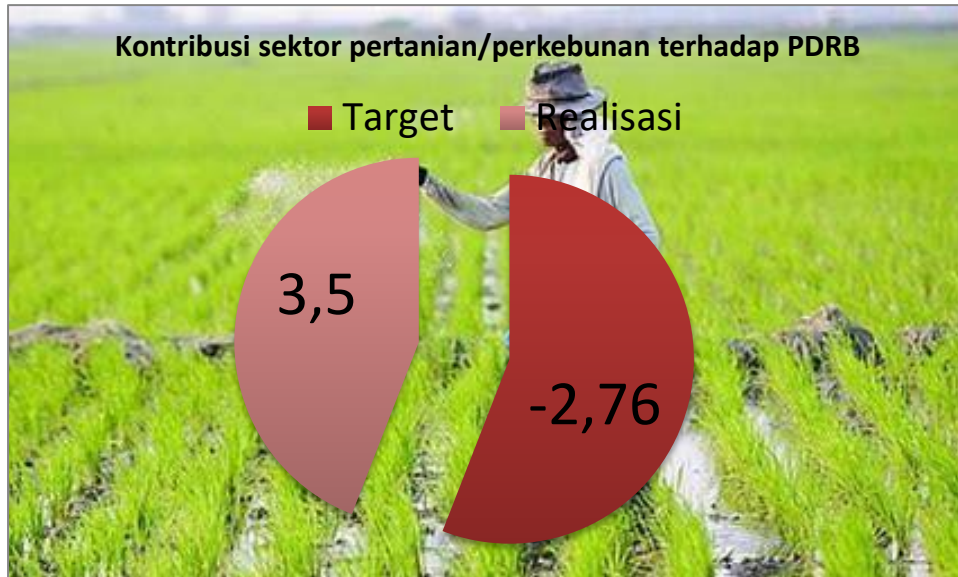
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Kelautan dan Perikanan				85,36	Sedang
Produksi perikanan (ton)					
Produksi perikanan laut	ton	36.911	33.309	90,24	Tinggi
Produksi perikanan darat	ton	684	197,8	28,92	Tinggi
Konsumsi ikan	ton	53	52		Sangat Tinggi
Cakupan bina kelompok nelayan	%	40	40	100,00	Sangat Tinggi
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,42	48,42	100,00	Sangat Tinggi
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	46	46	100,00	Sangat Tinggi
Nilai tukar nelayan	%	105	103	103,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA, pengembangan UMKM, IKM Koperasi dan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan bersama*. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan dikategorikan sedang, indikator Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 3,5% realisasi mencapai -2,76% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.36
Capaian Realisasi Kontribusi Sektor
Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

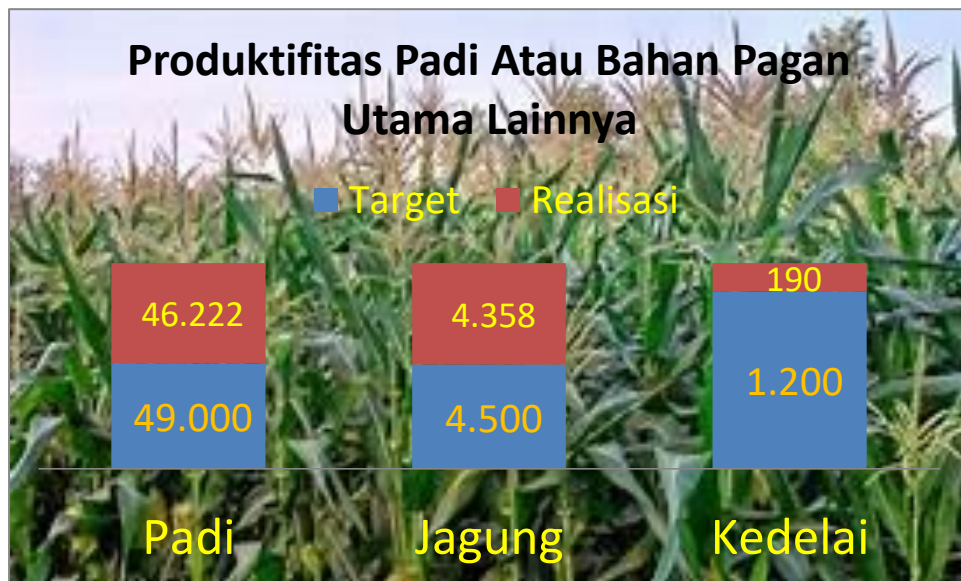
indikator Nilai tukar petani berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 100,14% realisasi mencapai 100,12% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.37
Capaian Nilai Tukar Petani
Berdasarkan Target RPJMD



indikator Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya terdiri dari Padi berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 49.000 ton realisasi mencapai 46.222 ton, jagung ditargetkan sebesar 4.500 ton realisasi sebesar 4.358 ton sedangkan kedelai ditargetkan sebesar 1.200 ton realisasi 190 ton seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar : 2.38
Capaian Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 22,77% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 96,97% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.79
Capaian Realisasi Anggaran Program
Pertanian dan Peternakan Tahun 2022

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	57.888.757.321	18.972.464.285	32,77	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.998.799.145	5.759.468.569	44,31	RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	922.056.257	321.071.240,00	34,82	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	53.594.250	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.016.000	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31.066.769.313	000	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.624.252.906	12.553.451.530	99,44	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	196.269.450	95.260.980	48,54	RENDAH
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.427.527.001	564.283.206	23,25	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Utam
Pertanian dan Peternakan Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	
Pertanian				96,97	Sangat Tinggi
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,5	3,5	100,00	Sedang
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,8	2,8	100,00	Sangat Tinggi
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,9	5,9	100,00	Sangat Tinggi
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
Padi	Ton	49.000	46.222	94,33	Sangat Tinggi
Jagung	Ton	4.500	4.358	96,85	Sangat Tinggi
Kedelai	Ton	1.200	190	15,83	Sangat Tinggi
Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	3.468,10	3.468,10	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA, pengembangan UMKM, IKM Koperasi dan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan bersama*. indikator Urusan Pemerintahan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dikategorikan sedang, indikator jumlah kunjungan wisata, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 55.698 orang realisasi mencapai 48.773 orang seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar : 2.39
Capaian Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

indikator jumlah objek wisata, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2022 sebesar 31 objek realisasi mencapai 31 objek orang seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar : 2.40
Capaian Realisasi Jumlah Objek Wisata
Berdasarkan Target RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 18,90% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 89,61% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.81
Capaian Realisasi Anggaran Program
Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.393.819.602	2.342.422.315	18,90	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.561.147.280	2.096.081.885	37,69	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	641.453.310	21.030.000	3,28	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	4.579.832.810	82.596.830	1,80	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	171.813.640	8.588.000	5,00	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	304.359.918	000	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	579.937.360	61.041.500	10,53	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	555.275.284	73.084.100	13,16	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kepemudaan Olah Raga dan Periwisata
Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Pariwisata dan Kepemudaan dan Olah Raga				89,61	Sedang
Kunjungan Wisata	Wisatawan	55,698	7223	12968,15	Sedang
Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	%	6	6	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah prestasi olahraga	Prestasi				
- Emas	Keping	8	8	100,00	Sangat Rendah
- Perak	Keping	7	7	100,00	Sangat Rendah
- Perunggu	Keping	6	6	100,00	Sangat Rendah
Jumlah organisasi olah raga	Organisasi	11	11	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	6	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah kegiatan olah raga	Kegiatan	6	6	100,00	Sedang
Lapangan olah raga	Unit	4	4	100,00	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

B. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 36,39% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 87,50,% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.83
Capaian Realisasi Anggaran Program
Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	12.167.990.160	4.415.621.752	36,29	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.332.297.078	3.298.499.792	39,59	RENDAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.365.016.400	500.532.500	36,67	RENDAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.182.356.643	341.453.460	28,88	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.288.320.039	275.136.000	21,36	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Utama
Perencanaan Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Perencanaan Pembangunan				87,5	Sedang
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Sangat Tinggi
Tersedianay Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Sangat Tinggi
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Doc	2	1	50	Sedang
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

2. Keuangan

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 10,68% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.85
Capaian Realisasi Anggaran Program
Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp		
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	245.872.086.207	26.252.949.372	10,68	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.319.081.702	4.334.973.470	35,19	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	230.851.820.340	19.851.680.902	8,60	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.701.184.165	2.066.295.000	76,50	SEDANG

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Utama
Keuangan Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 202		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Keuangan				100	Sangat Baik
Opini BPK terhadap laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	Sangat Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

3. Kepegawaian

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang kepegawaian berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 34,62% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 90,04% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.87
Capaian Realisasi Anggaran Program
Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.556.220.141	8.381.820.141	2902114581	34,62	Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.188.974.083	4.014.574.083	1.014.574.083	36%	Sedang
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.034.365.310	1.034.365.310	534.365.310	21%	Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.332.880.748	3.332.880.748	1.332.880.748	42%	Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kepegawaian Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan				90,08	Tinggi
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural dan fungsional	%	28,83	25,97	90,08	Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

4. Pengawasan

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2022, capaian realisasi keuangan sebesar 47,85% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 60% dengan kategori sangat **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.89
Capaian Realisasi Anggaran Program
Pendukung Urusan Pemerintahan Pengawasan Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRI WULAN II	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Inspektorat Daerah	8.793.854.003	8.585.854.003	4.107.994.961	47,85	Rendah
PROGRAM PENUNJANG	6.766.842.603	6.558.842.603	2.958.842.603	38,54	Rendah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.741.886.350	1.741.886.350	741.886.000	33%	Rendah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	285.125.050	285.125.050	100.124.000	50%	Sedang

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pengawasan Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Ket
		Target	Realisasi s/d TW II		
1	2	3	4	5	6
Pengawasan				60	Rendah
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Jumlah Temuan BPK	Kasus	6	0	0	Rendah
Nilai LAKIP/SAKIP	Opini	B	C	80	Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Morowali.

Berkaitan dengan hal tersebut gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan berkaitan

dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.91
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Kode	Urusan	Permasalahan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.01	PENDIDIKAN	• Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 121,33, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 105,13 jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 103,50 • Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 94,79,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 72,73. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 67,59. Hal ini menjelaskan penyelenggaraan wajib pendidikan 9 tahun belum berhasil dengan baik. • Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2019 untuk Tingkat SD/MI sebesar 98,73,. Tingkat SMP/MT sebesar 94,20 di bawah target; • Angka Putus Sekolah tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,45 relatif kecil,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 3,65. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK relative besar yaitu sebesar 10,34; • Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:99,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:189. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 1:231; • Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2019 telah mencapai 70 persen diperlukan usaha dan kerja keras pemerintah untuk mendorong kinerja kelulusan yang tinggi di tingkat SMA melalui koordinasi pada pemerintah provinsi yang memeliki kewenangan pendidikan Menengah.

Kode	Urusan	Permasalahan
		Di Kabupaten Morowali, Rasio guru/murid per kelas tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:14, Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:12. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 1:19.
1.02	KESEHATAN	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 93,5 persen di Tahun 2017 lebih rendah dari target 100 persen; - Angka Kematian Bayi pada Tahun 2019 mencapai 0,013 yang bermakna setiap 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia sebelum usia 1 Tahun. - Hingga Tahun 2019 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup mengalami penurunan menjadi 0,70. - Hingga Tahun 2017, angka kematian neonatal mencapai 0,81 atau 1 balita kurang dari setahun yang meninggal. Pada Tahun 2019 meningkat sangat signifikan menjadi 10,05. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali di sisi ibu hamil sampai ke wilayah terpencil, proses kelahiran dan pasca kelahiran - Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2017 mencapai 161 jiwa meningkat dari 92 jiwa per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2014, Tahun 2019 angka kematian ibu adalah 0, yang artinya tidak ada kasus kematian Ibu di Kabupaten Morowali. - Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali lebih tinggi dari UHH Sulawesi Tengah tetapi lebih rendah dari UHH nasional yang pada 2017 masing-masing mencapai 68,07 tahun, 67,32 tahun dan 71,06 tahun; 68,45 dan tahun 2019 meningkat menjadi 68,77. - Walaupun persentase kasus balita gizi buruk menurun dari 36 kasus pada Tahun 2013 menjadi 9 kasus di Tahun 2017, kasus bayi gizi buruk berada pada kisaran 7-9 kasus hingga Tahun 2019, masalah ini masih menjadi ancaman bidang kesehatan di

Kode	Urusan	Permasalahan
		Kabupaten Morowali; • Rasio dokter Tahun 2019 sudah mencapai sebesar 0,60 atau 60, walaupun rasio dokter telah melampaui rasio ideal yakni 32 dokter per 100.000 penduduk (rasio ideal Kemenkes 26 dokter per 100.000 penduduk), namun penyebarannya belum merata masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten; • Persalinan ibu hamil belum mencapai rasio persalinan oleh tenaga kesehatan yakni 88 persen; • Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan dari 80,30 persen di Tahun 2014 menjadi 12,59 persen di Tahun 2016; • Setiap puskesmas pembantu melayani 28 desa pada Tahun 2015 menjadi 26 desa tahun 2019. Jumlah desa sebanyak 133 desa cakupan Pustu juga tetap dengan 26,32. Rasio ini semakin baik namun, karena dua kecamatan di kepulauan yakni Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, maka daya jangkau pustu menjadi terbatas; • Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen bumil karena tidak melakukan kunjungan bumil K4 • Covid 19
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	• Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2019 sebesar 13,30 persen • Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Dari 30,64 persen Tahun 2015 menurun menjadi 17,60 persen pada tahun 2019 • Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan. • Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	• Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2015-2019, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2019 sebesar 86,99 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018. Hal ini

Kode	Urusan	Permasalahan
		berarti masih ada 13,01 persen penduduk Kabupaten Morowali belum dapat menjangkau air bersih terutama di wilayah Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan; • Rasio Rumah Layak Huni (RLH) menurun dari 20,51 persen di Tahun 2013 menjadi 17,32 persen di Tahun 2017. Pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan yang drastic sebesar 186,94. Selain itu, realisasi ini di atas target; • Rasio elektrifikasi baik PLN maupun non PLN meningkat dari 92,05 persen di Tahun 2017, Tahun 2019 meningkat menjadi 96,20 persen, namun sering mengalami pemadaman setiap hari;
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Morowali; • Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap perusahaan meningkat, sehingga mengganggu ketertiban umum. • Tindakan pengeboman ikan, pembusukan masih menjadi masalah di Kepulauan Salabangka dan Kecamatan Menui Kepulauan; • Kejahatan siber patut diantisipasi; • Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami peningkatan dari 782 di Tahun 2015 menjadi 975 di Tahun 2019. Selanjutnya untuk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kein-dahan) justru mengalami penurunan dari 20 di Tahun 2015 dan Tahun 2019 sebesar 8. Untuk indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2019 sebesar 5 meningkat dari Tahun sebelumnya • Sarana dan Prasarana pendukung dan operasional Satpol PP dan Damkar belum memadai dan jauh cukup.
1.06	BIDANG SOSIAL	• PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa) pada tahun 2018 sebesar 47.124 PMKS, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 49.012 PMKS. • Persentase PMKS yang tertangani tahun 2018 sebesar 35 persen dan tahun 2019 sebesar 45 persen. Dengan demikian

Kode	Urusan	Permasalahan
		masih banyak PMKS yang belum tertangani • Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun 2019 sebanyak 7 Kelompok • Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2019 sebanyak 100 persen • Korban bencana alam (Jiwa/KK) tahun 2018 sebanyak 257 KK dan tahun 2019 sebanyak 383 KK • Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 14 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 38 persen, namun masih banyak penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang belum menerima bantuan sosial.
2	BIDANG URUSAN TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR	
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	• Pada Tahun 2019 Angka Pengangguran terbuka sebesar 3,03 persen. Namun, kondisi Tahun 2019 masih sedikit lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dengan TPT masing-masing sebesar 3,11 persen dan 5,23 persen. Pada Tahun 2020, persentase TPT Kabupaten Morowali meningkat cukup besar menjadi 5,21 persen, Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,77 persen dan Nasional meningkat sebesar 7,07 persen ; • Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang) sebanyak 30 Orang tahun 2018, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 56 Orang • Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2018 sebesar 9,92, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9,16; • Belum adanya <i>link and match</i> antara pendidikan Tenaga Kerja dan kebutuhan dalam bursa kerja dan industry yang berkembang; • Informasi bursa kerja terbatas;

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal masih rendah rata-rata berpendidikan SMP/MTs; • Adanya <i>bottleneck</i> antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan pendidikan dan skil yang dimiliki calon tenaga kerja
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	• Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 11,46, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10,19 • Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD tahun 2019 sebesar 4 persen masih sangat kecil. • Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,50, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,45 • Masyarakat masih melakukan <i>doing gender</i> karena belum memahami secara jelas konsep gender
2.09	BIDANG PANGAN	• Rasio Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2018 sebesar 199,26, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 216,27. • Ketersediaan protein perkapita pada tahun 2018 sebesar 42,51, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 216,27 • Target produksi padi sawah pada Tahun 2019 yakni 47.796,98 ton belum tercapai, di mana realisasi produksi hanya sebesar 44.672 Ton. Sementara produksi tanaman pangan lainnya memenuhi dan ada yang melebihi target; • Walaupun realisasi produktivitas padi sawah pada Tahun 2019 produktivitas padi sawah melebihi target 4,93 ton/Ha (RPJMD Tahun 2018-2023) terealisasi 4,98 ton/Ha; • Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari daerah lain ; • Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan komersial; • Rendahnya pertumbuhan penyediaan prasarana irigasi pada wilayah-wilayah baru dan potensial bagi peningkatan ketersediaan pangan terutama padi; • Keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi hutan dan lahan

Kode	Urusan	Permasalahan
		khususnya di kawasan <i>upstream</i> (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;
2.10	BIDANG PERTANAHAN	• Tumpang tindih antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertanian masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan; • Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; • Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal; • Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal; • Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal.
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	• Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; • Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pertambangan yang mencemari air sungai dan laut untuk kegiatan perikanan; • Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan daratan (terutama hutan) dan ekosistem perairan laut; • Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; • Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai; • Semakin menurunnya tutupan terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak sesuai anjuran. • Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang dilalui oleh patahan (sesar) aktif yaitu sesar Matano sehingga termasuk daerah rawan gempa;

Kode	Urusan	Permasalahan
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Kurangnya penduduk yang memiliki e-KTP, walaupun penduduk yang memiliki KTP meningkat penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2018 sebesar 103.393; - Kurangnya penduduk yang memiliki Kartu Keluarga; - Kurangnya bayi yang memiliki akta kelahiran Tahun 2015 sebanyak 22.412 bayi, kemudian Tahun 2018 sebesar 8.146 bayi.
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<i>Span of control dan span of management</i> wilayah pembinaan sangat luas Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum sebanding dengan minimnya pembiayaan; - Data kelompok binaan belum dimuktahirkan sehingga menyulitkan pembinaan oleh Tim Penggerak PKK; - Fasilitas pembinaan PKK di tingkat kecamatan masih terbatas; - Masyarakat mempunyai pola pikir bahwa posyandu adalah milik Dinas Kesehatan, bukan milik masyarakat sehingga tanggung jawab operasionalnya diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali pada tahun 2018 sebesar 80,05 persen, pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 79,08 persen - Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2018 sebesar 69,51 persen, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 65,75 persen. - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2018 sebesar 12,64 persen, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 15,33 persen - Minimnya pemahaman penduduk atas makna program Keluarga Berencana; - Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan; - Terbatas akses masyarakat miskin dan di wilayah terpencil pada Program KB.

Kode	Urusan	Permasalahan
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	• Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan Peralatan Uji KIR; • Minimnya fasilitas pelabuhan laut, terminal bus, bandara Morowali; • Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada daerah rawan lakalantas; • Rasio izin trayek di bawah target yakni mencapai 15 poin di Tahun 2017 pada tahun 2019 meningkat mencapai 17 poin.
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	• Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi • Masih adanya wilayah desa <i>blank-spot</i> Jaringan Komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau. • Belum optimalnya penggunaan website sebagai sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. • Anggaran yang terbatas didalam penyiapan infrastruktur tower BTS dan akses jaringan internet pada wilayah terpencil.
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	• Persentase koperasi aktif terjadi fluktuasi setiap tahunnya dimana capaiannya 28 persen di Tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat sebesar 30,77 persen, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 22,56 persen • Minimnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi; • Minimnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; • Terbatasnya akses modal bagi UKM; • Terbatasnya akses informasi pasar bagi UKM; • Terbatasnya interkoneksi dengan Kawasan Industri yang ada
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	• Infrastruktur baik transportasi maupun energi dalam mendukung penanaman modal masih terbatas; • Sektor penanaman modal masih terfokus pada industri ekstraksi berbasis sumber daya alam khususnya pertambangan; • Promosi investasi belum memadai; • Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2018 sebanyak 111 investor, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 57 Investor;

Kode	Urusan	Permasalahan
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar US\$ 89,6 Milyar, pada tahun 2019 terjadi penurunan nilai investasi menjadi US\$ 25,8 Triliun
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	- Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan masih terbatas; - Kontribusi organisasi kepemudaan serta koordinasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah masih terbatas; - Jumlah prasarana olah raga belum memadai; - Sinkronisasi perencanaan kegiatan olah raga belum memadai.
2.20	BIDANG STATISTIK	- Beberapa publikasi penting bagi Kabupaten Morowali belum ada dan belum dijadikan kegiatan rutin yang dikerjasamakan dengan pihak badan Pusat Statistik seperti PDRB sembilan Kecamatan baik pendekatan lapangan usaha maupun penggunaan, Indeks Gini, NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), NTP Nelayan, dan lain-lain. - Terintegrasinya Sistem Data statistik belum terintegrasi dan termanfaatkan dengan baik didalam pengambilan keputusan.
2.21	BIDANG PERSANDIAN	- Anggaran mendukung persandian sangat terbatas. - Sampai dengan tahun 2020 belum adanya tenaga sandiman di kabupaten Morowali - Keamanan data dan informasi daerah sangat diperlukan didalam menjalankan pemerintahan termasuk keamanan tanda tangan pejabat daerah menghindari pemalsuan.
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	- Alokasi anggaran bagi kegiatan kebudayaan masih minim; - Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana kegiatan kebudayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan masih minim; - Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum dilakukan

Kode	Urusan	Permasalahan
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2018 realisasi sebanyak 10.244 pengunjung, pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi 3.510 pengunjung.
2.24	BIDANG KEARSIPAN	- Minat baca masyarakat masih minim yang disebabkan minimnya koleksi buku di perpustakaan; - Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih belum memadai; - Belum dilakukannya identifikasi perpustakaan tingkat komunitas; - Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih belum memadai; - Pengelola kearsipan masih terbatas; - Tradisi Tata Kelola arsip daerah belum dibudayakan
3	URUSAN PILIHAN	
3.27	PERTANIAN	- NTP belum mencapai nilai 100 - Menurunya kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB - Masih rendahnya kemampuan kelompok tani - Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian - Kualitas-Produk pertanian masih rendah - Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas - Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah - Kegagalan budidaya rumput laut, - menurunnya hasil perikanan tangkap, - lemah daya tawar nelayan, - alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga; - rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru;
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Masih rendahnya kesejahteraan nelayan. - Kewenangan kabupaten didalam pengelolaan kelautan dan perikanan sangat terbatas. - Sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi nelayan terbatas. - Anggaran didalam mendukung

Kode	Urusan	Permasalahan
		pengembangan perikanan terbatas • Pengembangan rumput laut masih belum optimal. • Potensi perikanan tangkap kabupaten morowali cukup besar • Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan
3.26	BIDANG PARIWISATA	• Masih rendahnya kontribusi PAD sector pariwisata terhadap APBD Kabupaten • Belum optimalnya penataan daya Tarik Wisata (DTW) • Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antar daerah sesuai potensi
3.30	BIDANG PERDAGANGAN	• Masih rendahnya akses permodalan bagi Pedagang/Usaha Mikro/informal • Program Pengembangan UMKM
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	• Pertumbuhan Industri pada tahun 2018 hanya minus 13, 41 sementara pada tahun 2019 mampu tumbuh pada 8,26. • Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB berdasarkan ADHB pada tahun 2018 6,91, pada tahun 2019 mampu tumbuh pada 6,91dimana lebih rendah pada tahun sebelumnya.
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	• Tidak adanya pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru dari Tahun 2014 – 2019. • Diperlukan Penyiapan Pembangunan dan Pembinaan Kawasan PermukimanTransmigrasi baru
4	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	• Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal. • Nilai SAKIP Pemerintah Masih dalam Katagori Rendah • Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan • Belum terbangunnya Fasilitas Kerjasama Daerah • Masih terbatasnya aparatur UKPBJ • Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JF-PPBJ). • Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa • Belum stabilnya harga komoditi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Perlu adanya pengembangan Aparatur yang Profesional, Adaptif dan responsif. • Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP dan Penerapan Standar Pelayanan minimal. • Belum optimalnya kordinasi penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD	• Belum optimalnya capaian Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
5.01	PERENCANAAN	• Masih rendahnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan. • Dokumen perencanaan belum singkron • Pengolahan data dan informasi pembnagunan daerah belum optimal. • Koordinasi perencanaan masih perlu ditingkatkan
5.02	KEUANGAN	• Kurang optimalnya capaian pendapatan PAD. • Alokasi anggaran untuk pencapaian target pembangunan sulit tercapai karena situasi pandemi covid yang mengharuskan refocusing anggaran.
5.03	KEPEGAWAIAN	• Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN.
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	• Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	• Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	• Masih kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal • Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas auditor
7.01	KECAMATAN	• Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan. • Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	• Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan.

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat. • Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan. • Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Morowali untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (rasio gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2022.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.1.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Morowali menurut lapangan usaha sebagaimana ditampilkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/Kota Morowali (miliar rupiah), 2017–2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.971.246,90	2.049.001,70	2.063,37	2.025,94	2.147,50
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4.651.534,80	6.928.105,90	8.292,67	11.362,64	18.404,88
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	6.050.589,30	23.463.411,70	29.415,56	43.380,74	70.356,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1.376,10	1.681,50	1,73	1,78	1,9
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4.469,80	5.662,60	5,24	5,66	5,82
F	Konstruksi/Construction	2.626.713,90	2.976.235,70	3.480,35	3.139,21	5.543,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	782.786,40	893.433,00	960,77	947,45	1.065,44
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	66.307,90	70.970,20	81,34	59,85	64,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	18.206,10	21.032,10	21,35	19,04	22,75

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
1		2	3	4	5	6
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	172.171,00	202.092,00	221,71	234,25	260,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	136.375,30	148.348,30	156,37	170,16	191,63
L	Real Estat/Real Estate Activities	133.122,90	138.884,20	145,54	148,42	151,95
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3.118,10	3.359,50	3,77	3,74	3,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	192.640,80	213.398,10	240,34	261,51	278,72
P	Jasa Pendidikan/Education	108.199,40	111.566,20	119,1	120,36	121,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	65.545,70	73.352,80	80,83	87,84	97,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	51.448,90	55.949,00	59,56	59,73	61,73
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Product		17.035.853,40	37.356.484,40	45.349,58	62.028,34	98.779,81

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas PDRB ADHB Kabupaten Morowali dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 29 persen.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/ Kota Morowali (juta rupiah), 2017–2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.393.405,60	1.411.278,90	1.437,27	1.397,50	1.442,50
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4.237.418,00	6.408.961,50	7.676,33	10.315,56	12.701,49
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4.552.229,80	17.168.966,60	21.304,23	28.813,49	35.981,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1.395,90	1.608,80	1,64	1,71	1,76
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	3.738,90	3.932,10	3,94	4,17	4,30
F	Konstruksi/Construction	1.863.976,20	1.980.844,50	2.244,40	1.872,34	3.266,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	570.027,20	603.127,20	620,63	589,75	642,84
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	51.524,30	53.284,00	56,73	40,13	42,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	14.741,40	13.966,30	14,53	13,00	14,85
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	151.364,20	170.839,20	182,45	195,38	214,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	101.405,30	106.767,30	106,95	121,10	130,65
L	Real Estat/Real Estate Activities	103.848,00	106.051,60	109,00	109,86	111,20
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2.506,90	2.255,70	2,37	2,34	2,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	141.039,10	145.023,60	152,35	153,98	161,05

P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	81.850,00	82.841,80	85,32	85,17	85,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	55.396,40	58.806,60	63,72	68,12	70,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	37.972,30	39.845,90	40,88	40,70	41,56
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	13.363.839,10	28.358.401,60	34.102,75	43.824,29	54.916,24

Sumber: BPS, 2022

Penghitungan PDRB ADHK telah memperhitungkan inflasi di tahun 2021. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB ADHK tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 17 persen.

3.1.1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB ADHK menurut pengeluaran di Kabupaten Morowali di Tahun 2021 secara umum dari semua jenis pengeluaran komponen PDRB mengalami peningkatan. Adapun tabel PDRB ADHK disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten/ Kota Morowali (juta rupiah), 2017–2021

Jenis Pengeluaran/ <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	2.747.851	2.950.150	3.084	2.939
Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	65.529	75.051	81	77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	439.337	431.509	440	425
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	7.223.860	7.530.194	11.788	10.174
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	310.041	1.009.384	-19	102
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	2.577.221	3.024.334	18.712	30.229
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	13.363.839	15.02.621	34.085	43.948

Sumber: BPS, 2022

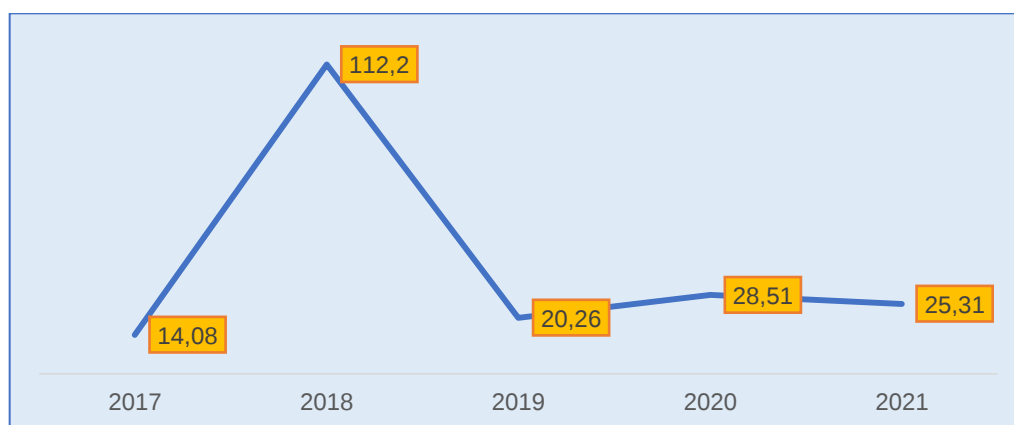
Kondisi perekonomian dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 yang diharapkan makin membaik pasca pandemi. Adapun target dan proyeksi PDRB di tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (juta)	Rp. 54.806.238,90
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	Rp. 72.844.367,70

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator makro lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.



Gambar 3. 1
Perkembangan LPE (%) Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,88 persen. Adapun Target LPE dalam RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

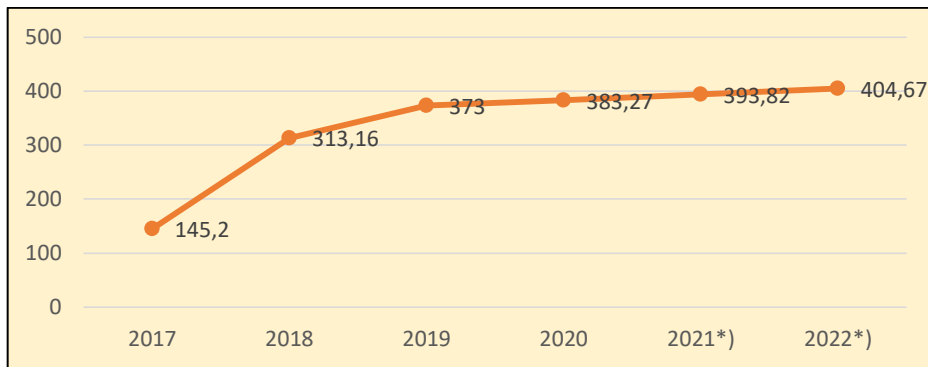
Tabel 3.5
Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	14

3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2017-2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.2). Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali tercatat sebesar 245,2 juta rupiah sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 383,27 juta rupiah. Dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19, cakupan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang semakin meluas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, maka kondisi perekonomian juga diperkirakan makin membaik. Di prediksi pada tahun 2021, nilai PDRB Per kapita naik menjadi 393,82 juta rupiah, tahun 2022 nilai PDRB Per kapita naik menjadi 404,67 juta rupiah. Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;

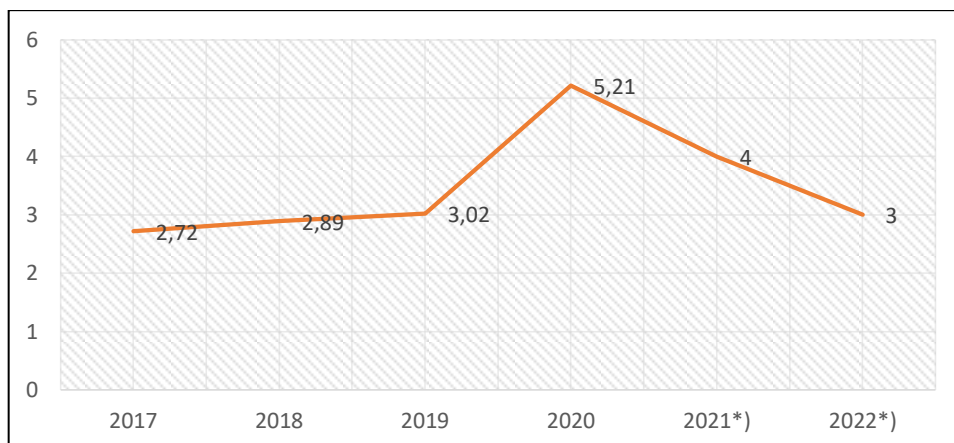
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.6

PDRB Per Kapita ADHB dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2017-2022
(juta rupiah)

3.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali periode 2017-2020 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat dan selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tengah maupun TPT Nasional. Angka TPT Morowali mengalami peningkatan menjadi 3,02 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 5,21 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,00 persen, kemudian menurun pada periode 2022 menjadi 3,00 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;

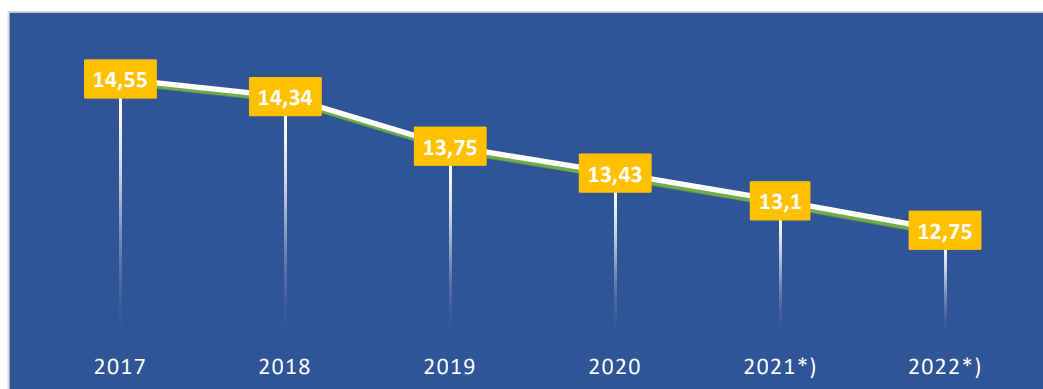
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2017-2020 dan
Proyeksi Tahun 2021-2022

3.1.5. Kemiskinan

Pada periode 2017-2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahun hampir 1 persen. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 dan di tahun 2022 diprediksi akan menurun. Pada tahun 2021, seiring dengan pemulihan ekonomi dan sosial, diperkirakan pendapatan perkapita penduduk akan terus meningkat, sehingga diproyeksikan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali mengalami penurunan menjadi 13,10 persen sedangkan pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar 12,75 persen.



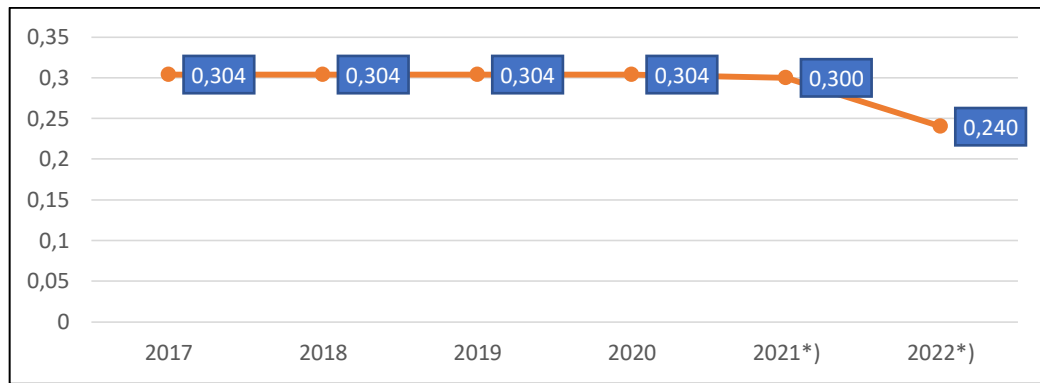
Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;
) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2017-2020 dan
Proyeksi Tahun 2021-2022

3.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Selama periode 2017-2020, nilai Rasio Gini Kabupaten Morowali cenderung stabil berada pada kategori sedang. Beberapa program unggulan pemerintah daerah dan adanya peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalan di Kabupaten Morowali sejak tahun 2018 khususnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung.

Pada tahun 2021 diproyeksikan nilai Rasio Gini sebesar 0,300 dan sedikit menurun pada periode 2022 menjadi sebesar 0,240. Meskipun nilai Rasio Gini terus mengalami perbaikan, namun tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran ini masih termasuk dalam kategori sedang.



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;

*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.5

Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam kondisi pasca pandemi, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan anggaran dan pendapatan daerah. Tantangan dan prospek perekonomian daerah di tahun anggaran 2022 serta beban kerja target RPJMD mengharuskan adanya kebijakan yang tepat pada keuangan daerah, baik di sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 meliputi :

1. Pendapatan Transfer menyesuaikan PMK;
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi TA. 2022 dan perkembangan PAD sampai dengan bulan Juni 2022, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber- sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali maka berdasarkan prinsip kehati-hatian Pasca pandemi COVID-19 masih diperlukan upaya berikut ini:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian pasca pandemi, proyeksi total pendapatan daerah diasumsikan turun sebesar Rp 134.611.611.396 yaitu dari sebesar Rp 1.466.842.480.886 rupiah menjadi Rp 1.332.230.869.490. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 37.540.898.983 dan

Pendapatan Tranfer sebesar Rp. 394.951.348.983 turun menjadi Rp. 357.410.450.000 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 97.070.712.413.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2022 dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.466.842.480.886	1.332.230.869.490	(134.611.611.396,00)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	394.951.348.983	357.410.450.000	(37.540.898.983,00)
4.1.01	Pajak Daerah	128.871.116.864	134.507.450.000	5.636.333.136,00
4.1.02	Retribusi Daerah	170.199.000.000	168.603.000.000	(1.596.000.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.810.921.029	2.300.000.000	489.078.971,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.070.311.090	52.000.000.000	(42.070.311.090,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.071.891.131.903	974.820.419.490	(97.070.712.413,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.033.729.748.413	936.659.036.000	(97.070.712.413,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.161.383.490	38.161.383.490	-

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan perubahan pendapatan daerah dan adanya kenaikan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 175.943.043.106, maka secara umum kapasitas kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.331.431.710, dimana pada APBD penetapan sebesar Rp 1.490.114.348.759 menjadi Rp 1.531.445.780.469.

Perubahan kebijakan Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Morowali telah merumuskan kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan pagu indikatif sektoral.

Kelompok Belanja mengalami perubahan antara lain : Belanja operasi pada APBD penetapan semula dianggarkan sebesar Rp. 995.125.193.549 naik Rp. 35.616.098.179, Belanja modal semula dianggarkan sebesar Rp. 267.196.702.301 naik sebesar Rp. 3.151.135.418, dan Belanja transfer naik sebesar atau Rp. 6.846.743.500. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA	1.475.300.370.937	1.516.631.802.647	41.331.431.710,00
5,1	BELANJA OPERASI	995.125.193.549	1.030.741.291.728	35.616.098.179,00
5.1.01	Belanja Pegawai	390.251.612.218	394.247.131.914	3.995.519.696,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.532.453.065	561.311.706.848	28.779.253.783,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.600.000.000	1.600.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	67.609.128.266	70.486.452.966	2.877.324.700,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.132.000.000	3.096.000.000	(36.000.000,00)
5,2	BELANJA MODAL	267.196.702.301	270.347.837.719	3.151.135.418,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.887.014.700	6.858.575.375	(28.439.325,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.853.490.753	44.020.287.278	4.166.796.525,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.029.290.993	160.568.234.969	(3.461.056.024,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.462.492.795	56.851.441.037	2.388.948.242,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.964.413.060	2.049.299.060	84.886.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.766.707.367	4.484.161.980	(4.282.545.387,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.766.707.367	4.484.161.980	(4.282.545.387,00)
5,4	BELANJA TRANSFER	204.211.767.720	211.058.511.220	6.846.743.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.985.664.720	48.985.664.720	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155.226.103.000	162.072.846.500	6.846.743.500,00
	Total Surplus/(Defisit)	(8.457.890.051,00)	(184.400.933.157,00)	(175.943.043.106,00)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2022 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2021.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Proyeksi penerimaan pembiayaan diasumsikan naik sebesar Rp 175.943.043.106 yaitu dari sebesar Rp 1.23.271.867.873 menjadi Rp 199.214.910.979, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada SILPA. Berikut adalah proyeksi pembiayaan tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.271.867.873	199.214.910.979	175.943.043.106,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.271.867.873	199.214.910.979	175.943.043.106,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.813.977.822	14.813.977.822	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000	13.500.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.313.977.822	1.313.977.822	-
	Pembiayaan Netto	8.457.890.051	184.400.933.157	175.943.043.106,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dirumuskan dalam rangka pencapaian target visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023.

Visi Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama”**.

Penjelasan visi “Sejahtera” yaitu gambaran masyarakat Kabupaten Morowali yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi : sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai. Sedangkan “Bersama” dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

Visi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi daerah. Rumusan misi tersebut juga sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran visi dari Kabupaten Morowali yang tertuang dalam dokumen P-RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 maka misi dirumuskan sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.
- Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pengembangan UMKM, IKM , Koperasi dan Bumdes untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa, sehingga tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Bahagia
- Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali

Misi Kabupaten Morowali		Tujuan		Sasaran	
1	Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.	1	Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
				2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
				3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
				4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alan (SDA),	2	Meningkatkan skala ekonomi Daerah untuk	5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
				6	Tumbuhnya Investasi

	Pengembangan UMKM, IKM , Koperasi dan Bumdes untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama		Kesejahteraan bersama		Daerah
				7	Meningkatnya PDRB perkapita
				8	Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat
				9	Menunnya Jumlah Pengangguran
				10	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
				11	Meningkatkan ketersediaan pangan
				12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3	Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertakwa, sehingga tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	3	Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)	13	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lmtaq
				14	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
				15	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah
				16	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah
				17	Meningkatnya Pelestarian seni dan Budaya Lokal
				18	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama Kab Morowali
4	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Bahagia	4	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	19	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah
				20	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan Infrastruktur digital
5	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan	5	Meningkatkan Daya Dukung	21	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

	Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana		dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	22	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku
				23	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten
				24	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali

Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid19
3. Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel-tabel selanjutnya.

Tabel 4.2. Keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD 2018 2023 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	
	Peningkatan Perencanaan, pengawasan dan Evaluasi pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	
	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	Peningkatan layanan Pemerintah kabupaten melalui revitalisasi Arsip berbasis digital dan Optimalisasi peran sekretariat daerah	
	Peningkatan Tunjangan Kinerja Honorer Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa	
	Penguatan Tatakelola Kependudukan dan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	
	Harmonisasi hubungan Eksekutif dan Legislatif	
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber penerimaan.	

Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian Tujuan SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa	Meningkatkan kemajuan desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa	
	Memajukan desa melalui Percepatan peningkatan status desa	
Peningkatan peran sektor unggulan non tambang dalam membangun ekonomi inklusif Morowali	Pengembangan pariwisata mendukung Ekonomi inklusif melalui penataan destinasi unggulan Morowali	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid19
	Optimalisasi Peran Bumdes dalam Pengembangan Ekonomi Desa melalui dukungan Modal Usaha Untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar UMKM, IKM dan Koperasi	Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Daerah melalui Pembinaan dan Pendampingan Usaha serta mendorong penggunaan ekosistem digital	
	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar tradisional serta perlindungan konsumen.	
	Pengembangan kawasan industri dan hilirisasi Industri berbasis pada potensi unggulan lokal	
Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing melalui pelayanan yang cepat, mudah dan murah	
	Mendorong Investasi sektor unggulan dalam membuka lapangan kerja baru	
	Mendorong lahirnya UMKM dan koperasi yang maju dan memenuhi kebutuhan masyarakat	

Meningkatkan Pemerataan Kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak bagi calon tenaga kerja	Memfasilitasi dan memastikan menyerap Tenaga Kerja lokal pada setiap industri yang disirikan dikabupaten dan melindungi hak-hak pekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Morowali	
Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan melindungi Hak-hak pekerja local dalam hubungan industrial	Pembukaan Lapangan Kerja Dengan Melibatkan UMKM dan Koperasi	
	Memfasilitasi dan memastikan menyerap Tenaga Kerja lokal pada setiap industri yang disirikan dikabupaten dan melindungi hak-hak pekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Morowali	
Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertambangan, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	Peningkatan produktivitas tanaman	
	pangan dan Holtikultura	
	Pembukaan Lahan Sawah Baru Dan fasilitasi Ketersediaan Pupuk Organik dan non organik	
	Peningkatan Produktivitas Peternakan melalui Penyediaan Bibit Ternak Unggulan	
	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapras perikanan tangkap dan budidaya untuk	
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan dan mutu pangan	
Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat miskin	Percepatan pengentasan kemiskinan melalui program yang sinergis dan bantuan tepat sasaran bagi PMKS	
	Penguatan peran koperasi dan BumDes dalam rangka stabilitasi harga kebutuhan pokok di Desa	
	Memulihkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin	

	dan/atau terdampak Pandemi COVID-19 melalui Bantuan Jaring Pengaman sosial	
Menyelenggarakan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan kesehatan Gratis	Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Terpenuhinya Standar	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun secara merata dan terjangkau	
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	
	Beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
	Meningkatkan literasi digital dan minat baca masyarakat morowali	
Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
Pemenuhan Standar	Meningkatkan ketersediaan (Kuantitas) sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan dan Desa serta usaha pengendalian penduduk	
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tatakelola Rumah Sakit Daerah Morowali dan RS Pratama melalui peningkatan sarana prasarana dan tenaga medis	
	Penyelenggaraan Kesehatan Gratis utk Semua melalui Pembiayaan BPJS-PBI	
Optimalisasi Pencegahan stunting	Penurunan Angka Stunting berbasis Desa dan Kelurahan	

Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan	Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dlm Pembinaan Karakter Pemuda yang <i>cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa</i>	
Keolahragaan serta pengembangan pesantren mempersiapkan generasi muda yang lmtaq	Penguatan pelatihan dan pembinaan prestasi olahraga dan penyiapan sarana prasarana olahraga masyarakat.	
	Optimalisasi peran pesantren dan peningkatan kualitas santri serta beasiswa santri	
Menguatkan Peran perempuan dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
Meningkatkan penerapan nilai-nilai Agama, pelestarian Seni dan Budaya lokal Morowali bersendikan agama	Memajukan dan melestarikan Seni Budaya lokal melalui penyelenggaraan lvent dan tradisi tahunan	
	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dalam kehidupan masyarakat Morowali	
Meningkatkan toleransi umat beragama dan stabilitas Polhukam	Fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan dalam memperkuat toleransi umat beragama	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan Koordinasi, kerjasama yang sinergis dan integrative dalam peningkatan Polhukam Daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menjaga stabilitas politik dan hukum dengan pelibatan peran Forkompinda, partai politik dan stakeholders.	
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur melalui peningkatan fasilitas jalan, jembatan, air bersih, Listrik, transportasi	Penyediaan saran prasarana jalan kondisi baik mendukung aksesibilitas produksi dan pengembangan destinasi Pariwisata daerah	Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
	Membangun dan peningkatan kemantapan Jalan, jembatan Kabupaten	

dan perumahan layak	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air kewenangan Kabupaten mendukung produktivitas dan kemajuan pertanian dan Perikanan	
	Pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai dan penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	
	Penyediaan sarana prasarana Keselamatan Transportasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Perhubungan	
	Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan khususnya listrik desa dan irigasi teknis	
Percepatan Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak upaya mengurangi penduduk miskin	Pembangunan dan reabilitasi rumah tidak layak huni Melalui Bantuan 2000 Unit Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, Khususnya Diwilayah Pesisir Dan Kepulauan (Rumah Sendiri/Rumah Sejahtera Mandiri)	
Peningkatan fasilitas air bersih bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan bahagia	Membangun dan peningkatan cakupan air bersih (air minum layak)	
Peningkatan pemanfaatan Ekosistem digital pada masyarakat	Memfasilitasi Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditingkat kecamatan dan desa	
	Percepatan pengelolaan satu data Morowali dan Persandian daerah berbasis Informasi teknologi	
	Koordinasi penyediaan jaringan internet desa dan hotspot area desa melalui optimalisasi anggaran desa	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui peningkatan	Meningkatkan kualitas air dan udara dengan penerapan Ketaatan penanggung jawab	

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan	
	Meningkatkan kualitas lahan pasca tambang	
	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Menata manajemen bencana daerah yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Meningkatkan Kesipsiagaan dan Misigasi Masyarakat wilayah Rawan Bencana Alam dan non alam	
	Peningkatan jumlah desa tangguh bencana	
Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kota	Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Kerjasama Pengelolaan Persampahan (Morowali Bebas Sampah/MOBASA)	
Mengoptimalkan layanan pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Mengurangi risiko dan dampak kerugian akibat kebakaran melalui respon dan layanan kebakaran daerah	
Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum	Meningkatkan Upaya Kepatuhan Masyarakat dalam Penegakan Perda dan Perkada	

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan kabupaten terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2022 :		
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi	Pemulihan Sosial Ekonomi Daerah Menuju Morowali Sejahtera Bersama

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022 :		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penanggulangan Korban Bencana Melalui Penyediaan APBD sensitif Bencana Berwujud <i>Cash For Work</i> berbasis pada korban bencana maupun <i>Cash For Work</i> di wilayah yang terdapat infrastruktur kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan peningkatan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan pelayanan dasar melalui infrastruktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan social akibat pandemi covid-19
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program Prioritas	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

Program Prioritas Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Pembangunan termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya; Percepatan Penanganan COVID-19.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota	Dinas Perikanan
				Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng	Peningkatan pelayanan dasar melalui infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
kesenjangan dan menjamin pemerataan	sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru	yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana		(RRTR) Kab/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan)	Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan	
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, RSUD Morowali, RS Pratama
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, RS Pratama
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	BPPD
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Unit berdasarkan Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disporabudpar
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Disporabudpar
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Disporabudpar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disporabudpar
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				(Sepuluh) Tahun Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	
			Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar		Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PUPR
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
			Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Program Administrasi Umum	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				Penataan Organisasi	
				Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Fasilitasi Tugas DPRD	
			Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPD
			Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Mutasi dan Promosi ASN	
				Pengembangan Kompetensi ASN	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Pendampingan dan Asistensi	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9 Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9 Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Kecamatan
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesbangpol

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			dan Budaya		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol

4.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Untuk mendukung keselarsan pencapaian tujuan pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten maka telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan setiap daerah.

Target indikator makro pembangunan Kabupaten Morowalitahun 2022 termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2020	Target Tahun 2022		
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,21	73,44 - 73,48	69,7	74 -75
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	28,93	5,4 – 6,0	6,50 – 7,00	10-15
Persentase Penduduk miskin	Persen	13,43	8,5 – 9,0	9,9	12,75-11,01
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,21	5,5 – 6,2	3	2,00-3
Pendapatan Per kapita	Juta	142	NA	NA	300-400
Nilai Tukar Petani	Persen	98*	102 - 104	NA	100-102
Gini Rasio	Indeks	0,35*	0,376 - 0,378	0,24	0,30-0,24

Sumber Data BPS Diolah
Ket. * Angka Sementara

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Morowali secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali			Kategori	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0.7147
			Persentase Status Desa Maju	Persen	10-Nov
Meningkatkan skala ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan bersama	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Indeks	05-Jun
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Oct-15
		Tumbuhnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	04-May
		Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400
		Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
		Menunnya Jumlah Pengganguran	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	Persen	02-Mar
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100-102
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	105
		Meningkatkan ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	83.00-85.00
		Menurunnya Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin	Persen	12,75-11,01
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	70-75
Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	74,00-75,00
		Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lmtaq	Indeks Pendidikan	Indeks	50.00-55.00
			Harapan lama sekolah	Tahun	14.00-14.30
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	9,70-10
		Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	69,33-69,50
			Usia Harapan Hidup	Tahun	69,33-69,50
			Angka Stunting		30-28

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
		Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	75,5
		Prestasi Olahraga Daerah	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali Juara	35
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90
		Meningkatnya Pelestarian seni dan Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
			Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
		Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama Kab Morowali	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	65-70
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Kabupaten			Kategori (Nasional)	1.26-2.50 (Sedang)
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	30-32
			Rasio elektrifikasi	Persen	98-98
			Persentase Rumah Layak Huni	Persen	
			Persentase RT	Persen	90-92

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
			berakses air bersih		
		Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	Persen	85-90
			Presentase Koneksi Internet Desa	Persen	
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	55-60
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55-60
			Indeks Rawan Bencana	Indeks	95-90
			Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2-4
		Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	Persen	90
		Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten		
		Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	Persen	0

4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

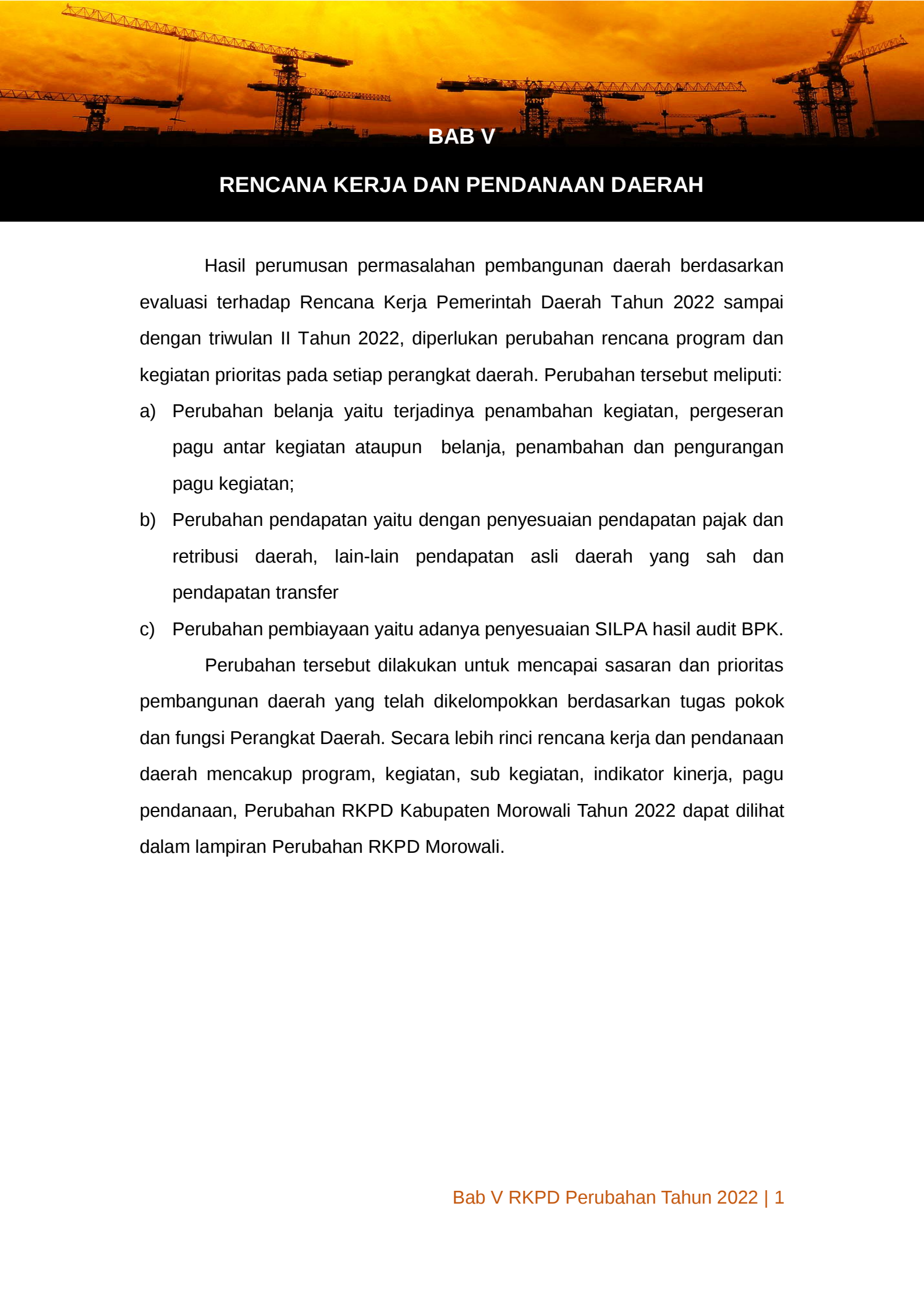
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan

menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kabupaten Morowali akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih dan transparan. Kabupaten Morowali dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5. Inovasi Pembangunan Daerah

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
1.	Kesejahteraan Guru Kontrak (Kejar Kontrak)	Meningkatkan Kualitas pendidikan guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing dan generasi muda yang lmtaq	▪ Harapan lama sekolah ▪ Rata-rata lama Sekolah	Dinas Pendidikan Daerah
2.	Bank Kampus (Bantuan Pendidikan Mahasiswa)				
3.	Rumah Sendiri (Rumah Sejahtera Mandiri) 50 Juta/Unit	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah
4.	Kesehatan Gratis (BPJS PBI)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Angka Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB
5	Padi Organik	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

The background of the page features a silhouette of several construction cranes against a vibrant orange and yellow sunset sky. The cranes are positioned at various heights and angles, creating a sense of industrial activity.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sampai dengan triwulan II Tahun 2022, diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap perangkat daerah. Perubahan tersebut meliputi:

- a) Perubahan belanja yaitu terjadinya penambahan kegiatan, pergeseran pagu antar kegiatan ataupun belanja, penambahan dan pengurangan pagu kegiatan;
- b) Perubahan pendapatan yaitu dengan penyesuaian pendapatan pajak dan retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan transfer
- c) Perubahan pembiayaan yaitu adanya penyesuaian SILPA hasil audit BPK.

Perubahan tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Secara lebih rinci rencana kerja dan pendanaan daerah mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 dapat dilihat dalam lampiran Perubahan RKPD Morowali.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka Ekonomi Daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, sekaligus menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 Semester II, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Tepe Asa Moroso